

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR PM 93 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
 ANGKUTAN LAUT

Contoh 1



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kepada
 Kapal pada Trayek Tetap dan eratur Yth..... 3)
 Angkutan Laut Dalam Negeri. Jl. 4)
 di
5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal dengan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Kapal :6)
- b. Nomor Pendaftaran :7)
- c. Tipe :8)
- d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT):9)
- e. Tenaga Penggerak (HP) :10)
- f. Kapasitas Angkut :11)
- g. StatusKepemilikan Kapal : milik / sewa
- h. Kode Trayek :12)
- i. Pelabuhan Pangkal :13)
- j. Route Trayek :14)
- k. Urgensi :15)
- l. Nomor dan Tanggal SIUPAL :16)
- m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal:17)

- n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya :
.....18)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- a. Salinan SIUPAL;
 - b. Salinan Spesifikasi Teknis Kapal;
 - c. Salinan Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal yang terakhir;
 - d. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
 - e. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
 - f. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.
2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 19)
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. (.....) 20)

An. Penanggung Jawab

(.....) 21)

Tembusan :

Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
15)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama perusahaan
21)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 1),..... 2)

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kepada
Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Yth. Direktur Utama PT..... 3)
Angkutan Laut Dalam Negeri Jl. 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal...., dan menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tetap dan teratur dengan data kapal sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal :6)
 - b. Nomor Pendaftaran :7)
 - c. Tipe :8)
 - d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) :9)
 - e. Tenaga Penggerak (HP) :10)
 - f. Kapasitas Angkut :11)
 - g. StatusKepemilikan Kapal : milik / sewa
 - h. Kode Trayek :12)
 - i. Pelabuhan Pangkal :13)
 - j. Route Trayek :14)
 - k. Urgensi :15)
 - l. Nomor dan Tanggal SIUPAL :16)
 - m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal :17)
 - n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya :18)

3. Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur ini berlaku dari tanggal..... sampai dengan 19) Apabila kapal yang dioperasikan tidak menyinggahi pelabuhan secara tetap dan teratur dengan berjadual, maka akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, selain itu saudara wajib memperhatikan :
- a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
 - b. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;
 - c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)

..... 22)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 2

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse Power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14)	Diisi dengan urutan pelabuhan yang disinggahi disertai dengan jarak mil antarpelabuhan.
15)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
21)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
22)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh

LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan Kedatangan Kapal Kepada
 (PKK) Yth. 3)
 Jl. 4)
 di
5)

Menunjuk Permenhub No. PM..... , dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba dipelabuhan Kapal Milik / charter / Keagenan *) sebagai berikut :

1. Nama Kapal / Voyage :6)
2. Bendera / IMO Number :7)
3. DWT / GT :8)
4. Draft :9)
5. LOA :10)
6. Pemilik / Principle :11)
7. Nama Agen :12)
8. Nama Nakhoda :13)
9. Trayek : Tetap dan Teratur / Tidak Tetap dan Tidak Teratur *)
10. Jenis Pelayaran : SIUPAL / SIOPSUS / SIUPER *)
11. ETA / ETD :14)
12. Pelabuhan Asal / Tujuan : Dari Tujuan15)
13. Posisi Kapal Sekarang :16)
14. Tambat / Labuh yang diminta : Sesuai dengan kondisi masing-masing Pelabuhan *)
15. Jenis barang yang akan di :
 a. Bongkar : 1) Non Kontainer Barang Umum (GC) / Curah Kering/Cair *)
 2) Kontainer Isi 20" / 40" Boxes
 Kosong 20" / 40" Boxes
 b. Muat : 1) Non Kontainer Barang Umum (GC) / Curah Kering/Cair *)
 2) Kontainer Isi 20" / 40" Boxes
 Kosong 20" / 40" Boxes
16. PBM yang ditunjuk :17)
17. Rencana Kerja Bongkar Muat :18)
18. Jenis Barang (sesuai manifest) 19)

Uraian		Bongkar		Muat	
a.	General Cargo (brg. Campuran)	T/M3	T/M3
b.	Bag. Cargo (brg. Karungan)	T/M3	T/M3
c.	Bulk Cargo (brg curah)	T/M3	T/M3
d.	Liquid cargo (brg cair)	T/M3	T/M3
e.	Barang berbahaya	T/M3	T/M3
f.	Lain-lain	T/M3	T/M3
	Jumlah	T/M3	T/M3
	Penumpang Naik/Turun	Org	Org
	Hewan turun	Ekor	Ekor

Diisi20) No./......./......./Lala/.....21)

Mengetahui,

A.N22)

Perusahaan Pelayaran

.....23)

.....24)

Pimpinan

Tembusan :

1. Kabid Lala & Kepelab;
2. Kabid Gamat;
3. BUP setempat.

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3a

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama kepala kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
4)	Diisi dengan alamat kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
5)	Diisi dengan nama kota kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan IMO number
8)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9)	Diisi dengan draft maksimal kapal
10)	Diisi dengan panjang kapal
11)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
12)	Diisi dengan nama agen
13)	Diisi dengan nama nahkoda
14)	Diisi dengan perkiraan waktu kedatangan kapal di pelabuhan asal dan waktu keberangkatan ke pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan
16)	Diisi dengan posisi kapal labuh dengan mencantumkan titik koordinat
17)	Diisi dengan nama PBM yang ditunjuk dalam pelaksanaan bongkar muat
18)	Diisi dengan rencana kerja bongkar muat
19)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
20)	Diisi dengan OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala

21)	Diisi denganno surat UPT yang bersangkutan
22)	Diisi dengannama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan
24)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan

3. Demikian laporan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diisi oleh21) No. / / / Lala /22)

Mengetahui,

A.N22)

Perusahaan Pelayaran

.....23)

.....24)

Pimpinan

Tembusan :

1. Kabid/ Kasi/ Petugas Lala & Kepelab;
2. Kabid/ Kasi/ Petugas Kesyahbandaran;
3. BUP setempat.

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3b

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama kepala kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
4)	Diisi dengan alamat kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
5)	Diisi dengan nama kota kantor penyelenggara pelabuhan (OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala)
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan IMO number
8)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
9)	Diisi dengan nama agen
10)	Diisi dengan alamat / telp / fax perusahaan
11)	Diisi dengan status kapal Milik/Sewa/Charter
12)	Diisi dengan tipe kapal
13)	Diisi dengan jenis pelayaran
14)	Diisi dengan trayek
15)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
16)	Diisi dengan panjang kapal
17)	Diisi dengan draft maksimal kapal
18)	Diisi dengan waktu keberangkatan menuju pelabuhan tujuan
19)	Diisi dengan jumlah penumpang (N/T/L)
20)	Diisi dengan jenis/jumlah muatan/ton/box
21)	Diisi dengan OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang

	Lala/Kasie Lala
22)	Diisi dengan no surat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
24)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan

Contoh 3c

LAPORAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN KAPAL

Nama :1)
 Ukuran :2)
 Nama Nakhoda :3)

4)

NO.	KEDATANGAN *)		BERANGKAT *)	
1.	Dari	:	Tujuan	:
2.	Tanggal	:	Tanggal	:
3.	Bongkar		Muat	
	a. Jenis Barang	:	a. Jenis Barang	:
	b. Jumlah (T/m)	:	b. Jumlah (T/m)	:
4.	Turun		Naik	
	a. Penumpang	:	a. Penumpang	:
	b. Hewan	:	b. Hewan	:
5.	Keterangan	:	Keterangan	:

.....5),6)

PT./Nakhoda KM.7)

(.....8))

*) Data rinci terlampir dalam manifest

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3c

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama kapal
2)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
3)	Diisi dengan nama nahkoda kapal
4)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
5)	Diisi dengan daerah pelabuhan tempat keberangkatan kapal
6)	Diisi dengan tanggal berangkat kapal menuju pelabuhan tujuan
7)	Diisi dengan nama kapal
8)	Diisi dengan nama nahkoda kapal

Contoh 4

**LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL
DI PELABUHAN**

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL/PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (PUSAT/CABANG)*)
JALAN :
TELEPON :

BULAN :

NO	NAMA KAPAL	DATANG DARIPE-LAB.		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT KE PELAB.		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK(*)	STATUS KAPAL(M/C/K)*)
		TGL				TGL					

*) Coret yang tidak perlu

..... tanggal

**PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT NASIONAL
PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS *)**

.....

Kepala

Keterangan :
L : Liner
T : Trampoer
M : Milik
C : Charter
K : Keagenan

Contoh 5a
LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (VOYAGE REPORT)

Nama Perusahaan Pelayaran/Non Pelayaran *) : PT.
 Alamat Perusahaan :
 T e l e p o n :
 Periode Laporan :
 Status Trayek : Liner/Tramper *)

Nama Kapal :
 Bendera/Status Kapal :
 Type/Ukuran Kapal :
 Kecepatan Ekonomis :

Pelabuhan Asal	Tiba		Berangkat		Jarak Mil	Waktu Berlayar			Waktu Berlabuh		Bongkar Muat		Waktu Yang di Perlukan	Pelabuhan Tujuan	Pemuatan/Pemberangkatan					
	Tgl	Jam	Tgl	Jam		Hari	Jam	Hari	Jam	Mulai	Selesai	B/M			Ton 1000 Kg	Ukuran (M3)	Penumpang	Hewan	Jenis Barang	Kemasan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

CATATAN :
 Keterlambatan handling oleh karena muatan, menunggu tongkang/truck, kerusakan kapal dsd.,20 ...
 Diperlukan : karena PT.
 Dilaut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb)
 (.....)

I. DAFTAR JENIS MUATAN

1. Beras	17. Minyak Goreng	32. Barang Kerajinan	48. Kaolin	64. Ikan Asia
2. Gula Pasir	18. Sayur-sayuran	33. Soda ash	49. Nikel	65. Rumput Laut
3. Gandum	19. Buah-buahan	34. Zat asam	50. Aluminium	66. Hasil Laut Lainnya
4. Tepung Terigu	20. Kapas	35. Mesin-mesin	51. Batubara	67. Sapi
5. Kedelai	21. Hasil Pertanian dan Perkebunan lainnya	36. Makanan Ternak	52. Pasir Kwarsa	68. Kerbau
6. Kacang-kacangan	22. Pupuk	37. Baja/Besi Beton	53. Pasir Besi	69. Kulit Hewan
7. Lada	23. Semen	38. Kertas	54. Pasir Lain	70. Kulit Ternak/Lainnya
8. Cengkeh	24. Garmen	39. Makanan/Minuman	55. Kliniker	71. Penumpang Umum
9. Rempah-rempah	25. Tekstil	40. Hasil Perindustrian lainnya	56. Hasil Pertambangan	72. Turis
10. Kopi	26. Elektronik	41. Crude Oil	57. Logos	73. TKI
11. Tembakau	27. Gapek	42. Bahan Bakar Minyak	58. Kayu Gergaji	74. Lain-lain
12. Kakao	28. Kedaraan	43. Gas/LNG	59. Kayu Lapis	
13. Teh	29. Furniture	44. Aspal	60. Rotan	
14. Karet	30. Garam	45. Timah	61. Hasil Hutan Lainnya	
15. Kopro	31. Bahan Kimia	46. Bauksit	62. Ikan	
16. Minyak Sawit		47. Tembaga	63. Udang	

II. DAFTAR JENIS KEMASAN

1. Bag. (pak/karung)
2. Case (Peti)
3. Bale (bali/bundal)
4. Barel (Kaleng)
5. Drum
6. Pallet
7. Petikemas
8. Barge
9. Dry Bulk
10. Liquid Bulk
11. lain-lain

III. DAFTAR TYPE KAPAL

1. Konvensional
2. Container (Petikemas)
3. Semi Container (Petikemas)
4. Landing Craft
5. Tongkang
6. Roro
7. Tunda
8. Penumpang
9. Bulk (curah)
10. Tanker
11. Lash
12. Ikan

13. Kapal Layar (1)
14. Kapal layar Motor(1)
15. Kapal Motor (1)
16. Lain-lain

Contoh 5b

LAPORAN TAHUNAN SIUPAL/SIOPSUS*)
TAHUN

Nomor : 1),..... 2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Tahunan Tahun 3)

Kepada
 Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
 Laut
 Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

di

JAKARTA

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal.....
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan Laporan Tahunan untuk tahun, terlampir disampaikan Data Umum Perusahaan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 4)

.....5)

..... 6)

Tembusan :
 DPP INSA.

*) sesuai dengan sifat pengusahaannya.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 5b

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili perusahaan
2)	Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
3)	Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan
4)	Diisi dengan nama perusahaan
5)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan
6)	Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan

Contoh 5cDATA UMUM PERUSAHAAN

Posisi : 31 Desember 20

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 1. | Nama perusahaan Angkutan Laut /
Angkutan Laut Khusus |1) |
| 2. | Akte Pendirian Perusahaan Nomor |2) |
| | Notaris |3) |
| | Nomor dan tanggal |4) |
| 3. | Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS*) |5) |
| 4. | Alamat perusahaan |6) |
| | Nomor telepon |7) |
| | Domisili |8) |
| 5. | Nama / DIRUT |9) |
| | Alamat Rumah |10) |
| | Nomor Telepon |11) |
| 6. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan |12) |
| 7. | Jumlah Tenaga Kerja |13) |
| | Orang | |
| | a. Darat : | |
| | - Pusat |14) Orang |
| | - Cabang |15) Orang |
| | b. Laut |16) Orang |
| 8. | Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut/
Angkutan Laut Khusus |17) Buah |
| | Alat kantor cabang terlampir | |
| 9. | Keanggotaan INSA (Nomor- Tanggal) |18) |
| 10. | Jumlah kapal yang dimiliki |19) Unit |
| | Jumlah Taruna /Siswa Praktek PRODA / PKL **) |20) Orang |
| | Jumlah kapal yang dioperasikan |21) Unit |

..... 20 22)

DIREKTUR UTAMA

{23}}

*) Sesuai dengan sifat pengusahaannya.

**) Bagi kapal yang berukuran diatas GT. 750

Contoh 5b

LAPORAN TAHUNAN SIUPAL/SIOPSUS*)
TAHUN

Nomor : 1),..... 2)

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Laporan Tahunan Tahun 3)

Kepada
 Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
 Laut
 Jl. Medan Merdeka Barat No. 8

di

JAKARTA

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal.....
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan Laporan Tahunan untuk tahun, terlampir disampaikan Data Umum Perusahaan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 4)

.....5)

..... 6)

Tembusan :
 DPP INSA.

*) sesuai dengan sifat pengusahaannya.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 5b

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili perusahaan
2)	Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
3)	Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan
4)	Diisi dengan nama perusahaan
5)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan
6)	Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan

Contoh 5cDATA UMUM PERUSAHAAN

Posisi : 31 Desember 20

- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Nama perusahaan Angkutan Laut /
Angkutan Laut Khusus |1) |
| 2. | Akte Pendirian Perusahaan Nomor |2) |
| | Notaris |3) |
| | Nomor dan tanggal |4) |
| 3. | Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS*) |5) |
| 4. | Alamat perusahaan |6) |
| | Nomor telepon |7) |
| | Domisili |8) |
| 5. | Nama / DIRUT |9) |
| | Alamat Rumah |10) |
| | Nomor Telepon |11) |
| 6. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan |12) |
| 7. | Jumlah Tenaga Kerja |13) |
| | Orang | |
| | a. Darat : | |
| | - Pusat |14) Orang |
| | - Cabang |15) Orang |
| | b. Laut |16) Orang |
| 8. | Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut/
Angkutan Laut Khusus |17) Buah |
| | Alat kantor cabang terlampir | |
| 9. | Keanggotaan INSA (Nomor- Tanggal) |18) |
| 10. | Jumlah kapal yang dimiliki |19) Unit |
| | Jumlah Taruna /Siswa Praktek PRODA / PKL **) |20) Orang |
| | Jumlah kapal yang dioperasikan |21) Unit |
| | | 20 22) |

DIREKTUR UTAMA

(.....23)

*) Sesuai dengan sifat pengusahaannya.

**) Bagi kapal yang berukuran diatas GT. 750

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 5c

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama perusahaan
2)	Diisi dengan nomo akte pendirian perusahaan
3)	Diisi dengan nama notaries pada akte pendirian perusahaan
4)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan
5)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
6)	Diisi dengan alamat perusahaan
7)	Diisi dengan nomor telepon perusahaan
8)	Diisi dengan domisili perusahaan
9)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan
10)	Diisi dengan alamat rumah Dirut perusahaan
11)	Diisi dengan nomor telepon rumah
12)	Diisi dengan NPWP perusahaan
13)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja
14)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di pusat
15)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di cabang
16)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di laut
17)	Diisi dengan jumlah cabang
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal keanggotaan INSA
19)	Diisi dengan jumlah kapal yang dimiliki
20)	Diisi dengan jumlah taruna/siswa praktek
21)	Diisi dengan jumlah kapal yang dioperasikan
22)	Diisi dengan tanggal surat
23)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan

Contoh 5d

**DATA ARMADA YANG DIMILIKI
PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT/ ANGKUTAN LAUT KHUSUS*)
PT.
POSISI :**

NO.	NAMA KAPAL	TYPE	TMPT DAN TAHUN PEMBUATAN	UKURAN			KAPASITAS ANGKUT				BENDERA	CALL SIGN	KONS TRUK SI	DIKLAS KAN PADA	KONSUMSI BBM/HARI		JENIS BBM	KECE PATAN	KET.	
				DWT	GT	HP	MS	TON	TEUS	ORANG					EKOR	DI LAUT				DIPELA BUHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

.....

DIREKTUR UTAMA

(.....)

*) Sesuai dengan sifat pengusahaannya.

Contoh 5e

**DATA KEGIATAN OPERASIONAL
KAPAL MILIK, CHARTER, DIOPERASIKAN
PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT / ANGKUTAN LAUT KHUSUS*)
PT.
POSISI :**

NO.	NAMA KAPAL	POLA OPERASI				HARI OPERASI TAHUN		HARI DOCK PER TAHUN	JARAK TEMPUH PER TAHUN	JUMILAH VOYAGE PER TAHUN	JUMILAH BONGKAR MUAT				JUMILAH LINE YANG DILAYARI PER TAHUN
		LINER		TRAMPER		DI LAUT	DI PELABUHAN				ANTAR PULAU	EKSPOR	IMPOR	JUMILAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

.....

DIREKTUR UTAMA

(.....)

*) Sesuai dengan sifat pengusahaannya.

Contoh 5f

**DATA KEGIATAN OPERASIONAL
KAPAL KEAGENAN PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT / ANGKUTAN LAUT KHUSUS *)**
PT.
POSISI :

10.	ANTAR PULAU (DALAM NEGERI)										LUAR NEGERI					
	NAMA KAPAL	UKURAN (DWT/GT)	BONGKAR/TURUN			MUAT / NAIK			NAMA KAPAL	UKURAN (DWT/GT)	IMPOR			EKSPOR		
			GENCAR (T/MB)	PENJIMPANG (ORG)	HEWAN (EKOR)	GENCAR (T/MB)	PENJIMPANG (ORG)	HEWAN (EKOR)			GENCAR (T/MB)	PENJIMPANG (ORG)	HEWAN (EKOR)	GENCAR (T/MB)	PENJIMPANG (ORG)	HEWAN (EKOR)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

.....
DIREKTUR UTAMA

(.....)

*) Sesuai dengan sifat pengusahaannya.

Contoh 6

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Deviasi Kapal..... Kepada
 Terhadap Trayek Tetap dan Teratur Yth. 3)
 Jl. 4)
 di
5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Laporan Rencana Pengoperasian Kapal7) No..... Tanggal.... sebagaimana terlampir, kami sampaikan surat 12) nomor 13) tanggal 14) perihal pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.
2. Sehubungan dengan 6), maka kapal KM. 7) yang kami operasikan pada trayek 8), setelah tiba di pelabuhan 9) akan melakukan deviasi ke pelabuhan 10).
3. Deviasi tersebut akan dilakukan pada tanggal 11).
4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 15)
 An. Penanggung Jawab

(.....) 16)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 6

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan penyebab kapal melakukan deviasi (misalnya dalam rangka mengangkut muatan tertentu dalam jumlah tertentu).
7)	Diisi dengan nama kapal.
8)	Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut.
9)	Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal deviasi.
10)	Diisi dengan nama pelabuhan tujuan deviasi.
11)	Diisi dengan tanggal deviasinya.
12)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
13)	Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12).
14)	Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12).
15)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
16)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 7

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Omisi Kapal..... Kepada
 Terhadap Trayek Tetap dan Teratur Yth. 3)
 Jl. 4)
 di
5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Laporan Rencana Pengoperasian Kapal7) No..... Tanggal.... sebagaimana terlampir, kami sampaikan surat 12) nomor 13) tanggal 14) perihal pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.
2. Sehubungan dengan 6), maka kapal..... 7) yang kami operasikan pada trayek 8), setelah tiba di pelabuhan 9) akan melakukan omisi pelabuhan 10).
3. Omisi tersebut akan dilakukan pada tanggal 11).
4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Homat kami,
 PT. (.....) 15)
 An. Penanggung Jawab

(.....) 16)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 7

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan penyebab kapal melakukan omisi (misalnya dalam rangka mengangkut muatan tertentu dalam jumlah tertentu).
7)	Diisi dengan nama kapal.
8)	Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut.
9)	Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal omisi.
10)	Diisi dengan nama pelabuhan yang diomit atau ditinggalkan.
11)	Diisi dengan tanggal omisinya.
12)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
13)	Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12).
14)	Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12).
15)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
16)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.

Contoh 8

Nomor : 1),..... 2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Deviasi Trayek Kapal.....

Kepada
 Yth. Direktur Utama PT..... 3)
 Jl. 4)

di

.....5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... , surat Saudara nomor tanggal perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No....., tanggal tentang Penempatan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri dengan ini disampaikan bahwa kapal KM. 6) yang dioperasikan PT..... 3) telah didaftar melakukan deviasi ke pelabuhan..... 7), dalam rangka 8)
2. Deviasi dilakukan pada tanggal 9)
3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No. tanggal tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk KM.....
4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 10)

..... 11)

..... 12)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 8

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nama pelabuhan tujuan deviasi.
8)	Diisi dengan alasan deviasi.
9)	Diisi dengan tanggal dilakukan deviasinya.
10)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
11)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
12)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13)	Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).

Contoh 9

Nomor : 1),..... 2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Omisi Trayek Kapal..... Kepada
 Yth. Direktur Utama PT..... 3)
 Jl. 4)

di
5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... , surat Saudara nomor tanggal perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No....., tanggal tentang Penempatan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri dengan ini disampaikan bahwa kapal KM. 6) yang dioperasikan PT..... 3) telah didaftar melakukan omisi ke pelabuhan..... 7), dalam rangka 8)
2. Deviasi dilakukan pada tanggal 9)
3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No. tanggal tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk KM.....
4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 10)

..... 11)
 12)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 9

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nama pelabuhan tujuan omisi
8)	Diisi dengan alasan deviasi.
9)	Diisi dengan tanggal dilakukan omisi
10)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
11)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
12)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13)	Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).

Contoh 10

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Substitusi KM.... Kepada
 Terhadap Trayek Tetap dan Teratur Yth. 3)
 Jl. 4)
 di
5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Laporan Pengoperasian Kapal7) No..... Tanggal.... sebagaimana terlampir, kami sampaikan surat 12) nomor 13) tanggal 14) perihal pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri.
2. Sehubungan dengan 6), maka kapal KM. 7) yang kami operasikan pada trayek 8), setelah tiba di pelabuhan 9) akan disubstitusi / diganti dengan kapal KM 10).
3. Substitusi tersebut akan dilakukan pada tanggal 11).
4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Homat kami,
 PT. (.....) 15)
 An. Penanggung Jawab

(.....) 16)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 10

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan penyebab kapal diganti dengan kapal lain (misalnya kapal utama akan dock).
7)	Diisi dengan nama kapal utama (kapal yang akan diganti).
8)	Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut.
9)	Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal disubstitusi.
10)	Diisi dengan nama kapal pengganti.
11)	Diisi dengan tanggal substitusi.
12)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
13)	Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12).
14)	Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12).
15)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
16)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 11

Nomor : 1),..... 2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Substitusi
 Kapal Kepada
 Yth. Direktur Utama PT..... 3)
 Jl. 4)
 di
5)

1. Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Saudara nomor tanggal perihal laporan substitusi, dengan ini disampaikan bahwa kapal 6) yang dioperasikan PT..... 3) telah didaftar melakukan substitusi pelabuhan..... 7), karena 8)
2. Substitusi dilakukan pada tanggal 9)
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

..... 10)

..... 11)
 12)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 11

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal utama.
7)	Diisi dengan nama kapal pengganti.
8)	Diisi dengan alasan penggantian kapal.
9)	Diisi dengan tanggal dilakukannya penggantian kapal.
10)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
11)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
12)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13)	Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).

Contoh 12

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Penambahan Kapal Kepada
 Pada Trayek Tetap Dan Teratur Yth. 3)
 Angkutan Laut Dalam Negeri. Jl. 4)
 di
5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor tanggal tentang Jaringan Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, bersama ini kami laporkan penambahan kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal :6)
 - b. Bendera :7)
 - c. Nomor Pendaftaran :8)
 - d. Type :9)
 - e. Isi Kotor (GT) :10)
 - f. Bobot Mati (DWT) :11)
 - g. Tenaga Penggerak (HP):12)
 - h. Kapasitas Angkut :13)
 - i. Status :14)
 - j. Kode Trayek :15)
 - k. Pelabuhan Pangkal :16)
 - l. Route Trayek :17)
 - m. Urgensi :18)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- a. Nomor Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;
 - b. Nomor Spesifikasi Kapal;
 - c. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
 - d. Penempatan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya;
 - e. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
 - f. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.
2. Masa berlaku pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 19)
 3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 20)
 An. Penanggung Jawab
 (.....) 21)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 12

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan bendera
8)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
9)	Diisi dengan type kapal.
10)	Diisi dengan isi kotor kapal.
11)	Diisi dengan bobot mati kapal
12)	Diisi dengan tenaga penggerak.
13)	Diisi dengan kapasitas angkut.
14)	Diisi dengan milik/charter/dioperasikan.
15)	Diisi dengan kode trayek.
16)	Diisi dengan pelabuhan asal/pangkal
17)	Diisi dengan nama-nama pelabuhan yang disinggahi
18)	Diisi dengan jenis muatan.
19)	Diisi dengan masa berlaku pengoperasian kapal.
20)	Diisi dengan nama perusahaan.
21)	Diisi dengan nama penanggung jawab.

Contoh 13

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Penambahan Kapal Kepada
 Pada Trayek Tetap Dan Teratur Yth. Direktur Utama PT..... 3)
 Angkutan Laut Dalam Negeri. Jl. 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor tanggal tentang Jaringan Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, serta surat Saudara Nomor tanggal perihal
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini kami menyetujui penambahan kapal pada kode trayek dengan masa berlaku pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 6)
3. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 7)

..... 8)

..... 9)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 13

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan masa berlaku pengoperasian kapal.
7)	Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
8)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
9)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 14

Nomor :1),2}
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

Yth. Kepada 3}
 Jl. 4}
 di
5}

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

- | | | |
|---|----------------|-----|
| a. Nama Kapal | : | 6} |
| b. Nomor Pendaftaran | : | 7} |
| c. Tipe | : | 8} |
| d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) | : | 9} |
| e. Tenaga Penggerak (HP) | : | 10} |
| f. Kapasitas Angkut | : | 11} |
| g. Status Kepemilikan Kapal | : milik / sewa | |
| h. Pelabuhan | : | 12} |
| i. Urgensi | : | 13} |
| j. Nomor dan Tanggal SIUPAL | : | 14} |
| k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal | : | 15} |
| l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya | : | 16} |

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- | | |
|----|--|
| a. | Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik); |
| b. | Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya. |
2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 17}
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 18}
 An. Penanggung Jawab

(.....) 19}

Tembusan :
 Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 14

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 15

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

Yth. Kepada PT 3)
 Jl. 4)
 di5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--|----------------|-----|
| a. | Nama Kapal | : | 6) |
| b. | Nomor Pendaftaran | : | 7) |
| c. | Tipe | : | 8) |
| d. | Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) | : | 9) |
| e. | Tenaga Penggerak (HP) | : | 10) |
| f. | Kapasitas Angkut | : | 11) |
| g. | Status Kepemilikan Kapal | : milik / sewa | |
| h. | Pelabuhansinggah | : | 12) |
| i. | Urgensi | : | 13) |
| j. | Nomor dan Tanggal SIUPAL | : | 14) |
| k. | Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal | : | 15) |
| l. | Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya | : | 16) |

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|--|
| a. | Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik); | |
| b. | Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya. | |
2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 17)
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

..... 18)

..... 19)
 20)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ...

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 15

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan singgah
13)	Diisi dengan urgensi
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
20)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 16

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Rencana Penambahan
 Pelabuhan Singgah pada Trayek
 Tidak Tetap dan Tidak Teratur
 Angkutan Laut Dalam Negeri.

Yth. Kepada3)
 Jl.4)
 di
5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

a. Nama Kapal :6)
 b. Nomor Pendaftaran :7)
 c. Tipe :8)
 d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) :9)
 e. Tenaga Penggerak (HP) :10)
 f. Kapasitas Angkut :11)
 g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
 h. Pelabuhan singgah :12)
 i. Urgensi :13)
 j. Nomor dan Tanggal SIUPAL :14)
 k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal :15)
 l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya :16)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
 b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.
2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 17)
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 18)
 An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 16

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 17

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Penambahan Pelabuhan Singgah Kepada

Yth. Direktur Utama PT.....3)
4)
Jl.5)

di-
6)

1. Menunjuk surat Saudara No.7) tanggal8) perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No.9) tanggal10) perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal11).
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan pelabuhan singgah12).
3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No.....13) tanggal14) perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal15).
4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16)
17)

Tembusan Yth. :

1. **Direktur Jenderal Perhubungan Laut;** 18)
2. **Penyelenggara Pelabuhan setempat;**
3. **Badan Usaha Pelabuhan Setempat;** 19)
4.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 17

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
9)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
11)	Diisi dengan nama kapal
12)	Diisi dengan pelabuhan singgah
13)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.
15)	Diisi dengan nama kapal
16)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
17)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 18

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Rencana Penambahan Urgensi Muatan pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

Yth. Kepada 3)
 Jl. 4)
 di
5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal, bersama ini kami menyampaikan laporan untuk memuat barang muatan umum (General Cargo) pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

- | | | |
|---|----------------|-----|
| a. Nama Kapal | : | 6) |
| b. Nomor Pendaftaran | : | 7) |
| c. Tipe | : | 8) |
| d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) | : | 9) |
| e. Tenaga Penggerak (HP) | : | 10) |
| f. Kapasitas Angkut | : | 11) |
| g. Status Kepemilikan Kapal | : milik / sewa | |
| h. Jenis Muatan Umum yang dimuat | : | 12) |
| i. Pelabuhan Asal | : | 13) |
| j. Pelabuhan Tujuan | : | 14) |
| k. Nomor dan Tanggal SIUPAL | : | 15) |
| l. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal | : | 16) |
| m. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya | : | 17) |

2. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 18)
 An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 18

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (General Cargo).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang memberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (General Cargo).
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan Jenis Muatan Umum Yang di Muat
13)	Diisi dengan pelabuhan asal
14)	Diisi dengan pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 19

Nomor :1),2}
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Penambahan Urgensi Muatan Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Kepada

Yth. Direktur Utama PT.....3}
4}
Jl.5}

di-
6}

1. Menunjuk surat Saudara No.7} tanggal8} perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No.9} tanggal10} perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal11}.
4. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan urgensi muatan12}.
5. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No.....13} tanggal14} perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal15}.
4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16)
17)

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 18)
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat; 19)
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 19

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
9)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
11)	Diisi dengan nama kapal
12)	Diisi dengan penambahan urgensi muatan
13)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.
15)	Diisi dengan nama kapal
16)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
17)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 20a

Nomor :1),.....2)
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Kepada
 Nasional pada Trayek Tetap dan Teratur Yth.3)
 Angkutan Laut Luar Negeri4)
 di5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal nasional pada trayek tetap dan teratur angkutan laut luar negeri dengan data sebagai berikut :

a. Nama Kapal :6)
 b. Bendera / IMO No. :7) /8)
 c. Ukuran (DWT/GT/HP) :9)
 d. Pemilik/ pengelola / operator kapal :10)
 e. Pelabuhan Singgah/ Rute yang akan dilalui :11)
 f. No dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :12)

2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut

a. Salinan Penunjukan Keagenan Kapal (*Agency Of Appointment*)
 b. Salinan Perjanjian Sewa Kapal (*Charter Party*)
 c. Salinan Perjalanan Kapal (*Sailing Schedule*)
 d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melayari Trayek yang telah ditetapkan
 e. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
 f. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
 g. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
 h. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)

3. Masa Berlaku Pengoperasian Kapal paling sedikit 6 (enam bulan) terhitung mulai tanggal s/d.....13).

4. Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih .

Hormat Kami
 PT.14)
 An. Penanggung Jawab
 (.....15)
16)

Tembusan :

1.
2. Ketua DPC/ DPP INSA

*) Coret yang tidak perlu

Contoh 20b

Nomor :1),.....2)
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Kepada
 Asing pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri Yth.3)
4)
 di5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal asing pada trayek tetap dan teratur angkutan laut luar negeri dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal :6)
 - b. Bendera / IMO No. :7) /8)
 - c. Ukuran (DWT/GT/HP) :9)
 - d. Pemilik/ pengelola / operator kapal :10)
 - e. Pelabuhan Singgah/ Rute yang akan dilalui :11)
 - f. No dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :12)
2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
 - a. Salinan Penunjukan Keagenan Kapal (*Agency Of Appointment*)
 - b. Salinan Perjanjian Sewa Kapal (*Charter Party*)
 - c. Salinan Perjalanan Kapal (*Sailing Schedule*)
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melayari Trayek yang telah ditetapkan
 - e. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
 - f. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
 - g. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
 - h. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)
3. Masa Berlaku Pengoperasian Kapal paling sedikit 6 (enam bulan) terhitung mulai tanggal s/d.....13).
4. Demikian permohonan kami atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih .

Homat Kami

PT.14)
 An. Penanggung Jawab

(.....15)
16)

Tembusan :

1. Penyelenggara Pelabuhan Setempat ;
2. Kacab/ GM Badan Usaha Pelabuhan Setempat ;
3. Ketua DPP/DPC INSA

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 20a DAN CONTOH 20b

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatangani surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO Kapal
9)	Diisi dengan Grosse Tonnage, Dead Weight Tonnage dan Horse Power
10)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/ yang mewakili pemilik kapal (principal)
11)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia dan luar negeri
12)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
13)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku Pengoperasian Trayek Tetap dan Teratur Kapal Angkutan Laut Luar Negeri
14)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut.
15)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
16)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 21

Nomor :1),.....2)
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal
3) pada Trayek Tetap dan Teratur
 Angkutan Laut Luar Negeri

Kepada
 Yth.4)
5)
 Di
6)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat PT.....7) No.8), tanggal 9) perihal permohonan Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri, bersama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal sebagai berikut:

- a. Nama Kapal :3)
- b. Bendera / IMO No. :10) /11)
- c. Ukuran (DWT/GT/HP) :12)
- d. Pemilik/ pengelola / operator kapal :13)
- e. No dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :14)

yang akan melayari pelabuhan Indonesia15) dan pelabuhan tujuan di luar negeri16), pp, dengan frekuensi kunjungan kapal sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sekali, untuk periode s/d 17)

2. Penetapan Trayek Tetap dan Teratur kepada kapal tersebut pada butir 1 (satu) diatas, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permenhub No. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal dan memperhatikan surat Permenhub No. 72 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut.
3. Apabila kapal tersebut pada butir 1 (satu) tidak memenuhi kewajibannya dalam kunjungan terhadap pelabuhan sesuai *sailing schedule* maka pemberitahuan *status liner* ini akan ditinjau kembali.
4. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

.....18)

Tembusan Yth. :

1. Dirjen Hubla;
2. Dirpelpeng Ditjen Hubla;19)
3. Penyelenggara Pelabuhan Setempat;20)
4. Badan Usaha Pelabuhan Setempat; NIP.....21)
5. PT.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 21

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatangani surat.
3)	Diisi dengan Nama Kapal
4)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs).
5)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
7)	Diisi dengan Nama Perusahaan Pelayaran
8)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pelayaran
9)	Diisi dengan tanggal permohonan
10)	Diisi dengan Bendera Kapal
11)	Diisi dengan IMO Number kapal
12)	Diisi dengan Grosse Tonnage, Dead Weight Tonnage dan Horse Power
13)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
15)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
16)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.
17)	Diisi dengan tanggal mulai berlaku Pengoperasian Trayek Tetap dan Teratur Kapal Anangkutan Laut Luar Negeri
18)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
19)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
20)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
21)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

Contoh 22

Nomor :1),.....2}
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pemberitahuan Rencana Pengoperasian Kapal Nasional pada Angkutan Laut Luar Negeri
 Kepada :
 Yth. :3)
 :4)
 di :
 :5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri, dengan data-data sebagai berikut :

- a. Nama Kapal / Voyage :6}
- b. Bendera / IMO No. :7) /8}
- c. Ukuran (DWT/GT/HP) :9}
- d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :10}
- e. Pemilik/ pengelola / operator kapal :11}
- f. Status Kapal :12}
- g. Pelabuhan Singgah :13}
- h. E T A / ETD :14) /15}
- i. Kegiatan B/M :16}
- j. Pelabuhan Asal/Tujuan *) :17}
- k. Crew List/ Kebangsaan :18}

2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- a. Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule)
- b. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
- c. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
- d. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
- e. Salinan Daftar Awak Kapal (Crew List)

3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Homat Kami

PT.19)
 An. Penanggung Jawab

(.....20)
21)

Tembusan :

- 1. Dirjen Hubla;
- 2. Deputy II Bakin *);
- 3. BAIS TNI *);
- 4. Ditjen Imigrasi *);
- 5. Penyelenggara Pelabuhan Setempat.

Coret yang tidak perlu*)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 22

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
7)	Diisi dengan Bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO Kapal
9)	Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power
10)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
11)	Diisi dengan nama pemilik // pengelola / operator kapal (principal)
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/ yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia
14)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
15)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
16)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
17)	Diisi dengan pelabuhan asal / tujuan di luar negeri
18)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
19)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut.
20)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
21)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 23

Nomor :1),.....2)
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal
 Nasional3) Angkutan Laut Luar
 Negeri Kepada
 Yth.4)
5)
 di
6)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No.7), tanggal 8), bersama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal / Voyage :3)
 - b. Bendera/ IMO Number :9) /10)
 - c. Ukuran (DWT/GT/HP) :11)
 - d. Pemilik/ pengelola / operator kapal :12)
 - e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :13)
 - f. Status Kapal :14)
 - g. Pelabuhan Singgah :15)
 - h. E T A / ETD :16) /17)
 - i. Kegiatan B/M :18)
 - j. Pelabuhan Asal/Tujuan *) :19)
 - k. Crew List/ Kebangsaan :20)
 - l. Keterangan :21)
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
 - b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dan pengangkut;
 - c. Melaporkan realisasi kegiatan kapal milik setiap 3(tiga) bulan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)
24)
 NIP25)

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy II Bakin ;
3. BAIS TNI ;
4. ASOPS KSAL;
5. Penyelenggara Pelabuhan Setempat 26).

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 23

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatangani surat.
3)	Diisi dengan Nama Kapal
4)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs).
5)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
7)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan pelayaran
9)	Diisi dengan Bendera Kapal
10)	Diisi dengan IMO Number kapal
11)	Diisi dengan grosse tonage, dead weight tonage dan Horse Power
12)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
14)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
15)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
16)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
17)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
18)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
19)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.
20)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
21)	Diisi dengan hal-hal lain terkait keperluan kapal
22)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
26)	Diisi dengan nama kantor pelabuhan yang bersangkutan

Contoh 24

Nomor :1),.....2)
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pemberitahuan Perubahan (Deviasi) Kepada
 Pengoperasian Kapal Nasional Yth.3)
 ke Luar Negeri4)
 di
5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana deviasi angkutan laut luar negeri untuk kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur, dengan data-data sebagai berikut :

- a. Nama Kapal / Voyage :6)
- b. Bendera / IMO No. :7) /8)
- c. Ukuran (DWT/GT/HP) :9)
- d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :10)
- e. Pemilik/ pengelola / operator kapal :11)
- f. Status Kapal :12)
- g. Pelabuhan asal di Indonesia :13)
- h. E T A / ETD :14) /15)
- i. Kegiatan B/M :16)
- j. Pelabuhan tujuan :17)
- k. Crew List/ Kebangsaan :18)
- l. Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal :19)
- m. Nomor dan tanggal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri :20)

2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- a. Salinan laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut dalam negeri
- b. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
- c. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
- d. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)

3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Homat Kami

PT.21)
 An. Penanggung Jawab

(.....22)
23)

Tembusan :
 - DPP INSA
 Coret yang tidak perlu*

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 24

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
7)	Diisi dengan Bendera Kapal
8)	Diisi dengan IMO Number kapal
9)	Diisi dengan gross e tonage, dead weight tonage dan Horse Power
10)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
11)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
12)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
13)	Diisi dengan nama pelabuhan asal/tujuan di Indonesia sesuai RPT
14)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
15)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
16)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
17)	Diisi dengan nama pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.
18)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
19)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
20)	Diisi dengan nomor dan tanggal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri
21)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
22)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
23)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 25

Nomor :1),.....2)
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Persetujuan Perubahan (Deviasi) Pengoperasian Kapal Nasional ke Luar Negeri

Kepada

Yth.3)
4)

Di
5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No.6), tanggal 7) perihal pada pokok surat serta memperhatikan surat Dirjen Hubla No..... 8) tanggal9) tentang Penempatan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri, bersama ini disampaikan data sebagai berikut :

a. Nama Kapal / Voyage :10)
 b. Bendera/ IMO Number :11) /12)
 c. Ukuran (DWT/GT/HP) :13)
 d. Pemilik/ pengelola / operator kapal :14)
 e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :15)
 f. Status Kapal :16)
 g. Crew List/ Kebangsaan :17)
 h. Keterangan :18)

2. Berdasarkan pemberitahuan Saudara bahwa kapal.....10) akan melakukan Deviasi ke luar negeri19) dari pelabuhan.....20) ETD.....21) dalam rangka BM.....22) dan setelah itu kembali ke trayek semula.
3. Sehubungan dengan butir 1 (satu) dan 2 (dua), dengan ini diberituhkan bahwa rencana deviasi angkutan laut luar negeri Kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional.
 - b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut.
 - c. Melaporkan realisasi kegiatan Kapal tersebut di atas.
4. Surat pemberitahuan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No. 8) tanggal9) tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk kapal.....10)
5. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....23)

(.....24)
25
 NIP.....26)

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputi V BIN TNI;
4. Asops KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Kasubdit Angla Dalam Negeri;
7. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat 27);

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 25

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Utama (Persero) PT. Pelindo Ybs).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
7)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan nomor surat Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri
9)	Diisi dengan tanggal surat Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri
10)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
11)	Diisi dengan Bendera Kapal
12)	Diisi dengan IMO Number kapal
13)	Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power
14)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
16)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
17)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
18)	Diisi dengan keterangan lain-lain yang diperlukan
19)	Diisi dengan nama pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan luar negeri
20)	Diisi dengan nama pelabuhan asal di Indonesia
21)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
22)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat barang
23)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
24)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
25)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
26)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
27)	Diisi dengan nama kantor Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bersangkutan

Contoh 26

Nomor :1),.....2)
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Kapal Kepada
 Berbendera Indonesia yang Dioperasikan di Luar Negeri Yth.3)
4)
 di
5)

1. Menunjuk PERMENHUB No. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri, dengan data-data sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal / Voyage :6}
 - b. Bendera / IMO No. :7) /8}
 - c. Ukuran (DWT/GT/HP) :9}
 - d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :10}
 - e. Pemilik/ pengelola / operator kapal :11}
 - f. Status Kapal :12}
 - g. Periode/masa berlaku :13}
 - h. Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal :14}
 - i. Pelabuhan di Luar Negeri :15}
2. Untuk melengkapi laporan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
 - a. spesifikasi kapal yang dioperasikan;
 - b. nama pelabuhan keberangkatan dan kedatangan di Indonesia;
 - c. bukti pengoperasian kapal berbendera Indonesia di luar negeri;
 - d. salinan sertifikat pendaftaran kapal;
 - e. salinan sertifikat keselamatan kapal;
 - f. salinan sertifikat keamanan kapal; dan
 - g. daftar awak kapal (crew list).
3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasi

Homat Kami

PT.16)
 An. Penanggung Jawab

(.....17)
18)

Tembusan :
 - DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 26

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Pemberitahuan Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia yang Dioperasikan di Luar Negeri
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri
6)	Diisi dengan Nama Kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO
9)	Diisi dengan Dead Weight Tonage, Grosse Tonage dan Horse Power
10)	Diisi dengan Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS
11)	Diisi dengan nama pemilik/pengelola/operator kapal
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan masa berlaku kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
15)	Diisi dengan nama pelabuhan selama kapal nasional beroperasi di luar negeri
16)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
17)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
18)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut

Contoh 27

Nomor :1),.....2)
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Persetujuan Kegiatan Kapal Berbendera Indonesia yang Dioperasikan di Luar Negeri

Kepada
 Yth.3)
4)
 Di
5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No.6), tanggal 7) perihal pada pokok surat, rencana kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di Luar Negeri dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal / Voyage :8)
 - b. Bendera / IMO No. :9) /10)
 - c. Ukuran (DWT/GT/HP) :11)
 - d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :12)
 - e. Pemilik/ pengelola / operator kapal :13)
 - f. Status Kapal :14)
 - g. Periode/masa berlaku :15)
 - h. Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal :16)
 - i. Pelabuhan di Luar Negeri :17)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat dalam daftar kapal milik di Ditjen Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional**
 - b. Mengurus kepentingan kapal Saudara dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan di luar negeri.
 - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut.
 - d. **Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal nasional yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di luar negeri yang belum *comply* dengan ketentuan SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code 2002).**

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....18)

Tembusan Yth :

1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy V BIN TNI
4. Deputi OPS KSAL;19)
5. Kepala BAIS TNI;20)
6. DPP INSA.21)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 27

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan pelayaran
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pelayaran
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
7)	Diisi dengan tanggal surat perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan Nama Kapal
9)	Diisi dengan bendera Kapal
10)	Diisi dengan Nomor IMO
11)	Diisi dengan Dead Weight Tonnage, Grosse Tonnage dan Horse Power
12)	Diisi dengan Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS
13)	Diisi dengan nama pemilik kapal/operator kapal
14)	Diisi dengan status kapal
15)	Diisi dengan periode/masa berlaku
16)	Diisi dengan Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal
17)	Diisi dengan nama pelabuhan selama kapal nasional beroperasi di luar negeri
18)	Diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)..
19)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)..
20)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
21)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

Contoh 28

Nomor :1),.....2)
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan Pengoperasian Kapal Nasional Pada Trayek Lintas Batas
 Kepada
 Yth.3)
4)
 Di
5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana Pengoperasian Kapal Nasional Pada Trayek Lintas Batas6), dengan data-data sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---------------------|
| a. Nama Kapal / Voyage | : |7) |
| b. Bendera | : |8) |
| c. Ukuran (DWT/GT/HP) | : |9) |
| d. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER | : |10) |
| e. Pemilik/ pengelola / operator kapal | : |11) |
| f. Status Kapal | : |12) |
| g. Pelabuhan Singgah | : |13) |
| h. E T A / ETD | : |14) /15) |
| i. Kegiatan B/M | : |16) |
| j. Pelabuhan Asal/Tujuan * | : |17) |
| k. Crew List/ Kebangsaan | : |18) |

2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
- Salinan kesepakatan dari usulan kelompok kerja sub regional dan/atau kesepakatan pemerintah kedua negara yang berbatasan
 - Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule)
 - Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
 - Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal
 - Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *
 - Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)
3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Homat Kami

PT.19)
 An. Penanggung Jawab

(.....20)
21)

Tembusan :

- Dirjen Hubla;
- Deputy II Bakin *);
- BAIS TNI *);
- Ditjen Imigrasi *);
- Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat.

Coret yang tidak perlu*)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 28

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pembertahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi)
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pembertahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pembertahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas
6)	Diisi dengan nama pelabuhan dan negara yang disinggahi ((Contoh : Nunukan (Indonesia) – Tawau (Malaysia))
7)	Diisi dengan nama dan voyage kapal
8)	Diisi dengan Bendera Kapal
9)	Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power
10)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER
11)	Diisi dengan nama pemilik // pengelola / operator kapal (principal)
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/ yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia
14)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
15)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
16)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
17)	Diisi dengan pelabuhan asal / tujuan di luar negeri
18)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
19)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut.
20)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama
21)	Diisi dengan nama direktur utama.

Contoh 29

Nomor :1),.....2)
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal
 Nasional3) Pada Trayek Lintas
 Batas Yth. Kepada4)
5)
 di
6)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No.7), tanggal 8), bersama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal nasional pada trayek lintas batas9) sebagai berikut :

- a. Nama Kapal / Voyage :3)
 b. Bendera :10)
 c. Ukuran (DWT/GT/HP) :11)
 d. Pemilik/ pengelola / operator kapal :12)
 e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER :13)
 f. Status Kapal :14)
 g. Pelabuhan Singgah :15)
 h. E T A / ETD :16) /17)
 i. Kegiatan B/M :18)
 j. Pelabuhan Asal/Tujuan *) :19)
 k. Crew List/ Kebangsaan :20)
 l. Keterangan :21)

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu), dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Gubernur Kepala Daerah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
- b. Gubernur Kepala Daerah Provinsi tidak bertanggung terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dan pengangkut;
- c. Melaporkan realisasi kegiatan kapal milik setiap 3(tiga) bulan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)
24)
 NIP25)

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy II Bakin ;
3. BAIS TNI ;
4. ASOPS KSAL;
5. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat 26);

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 29

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan Nama Kapal
4)	Diisi dengan Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan/ Syahbandar/JPP yang bersangkutan
5)	Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas (Direktur Utama PT. Pelindo/ BUP Ybs)
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang meneri Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas
7)	Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan pelayaran
9)	Diisi dengan nama pelabuhan dan negara yang disinggahi ((Contoh : Nunukan (Indonesia) – Tawau (Malaysia))
10)	Diisi dengan Bendera Kapal
11)	Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power
12)	Diisi dengan pemilik/pengelola/operator kapal
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER
14)	Diisi dengan status kepemilikan kapal
15)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negeri
16)	Diisi dengan tanggal ketibaan kapal
17)	Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal
18)	Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal
19)	Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.
20)	Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya
21)	Diisi dengan hal-hal lain terkait keperluan kapal
22)	Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi).
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi).
24)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi).
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas (Gubernur Kepala Daerah Provinsi).
26)	Diisi dengan nama kantor pelabuhan yang bersangkutan

Contoh 30

Nomor :1),.....2)
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing Kepada
 (PKKA) Yth.3)
4)
 Di
5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan rencana Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA), dengan data-data sebagai berikut :

- a. Nama Kapal / Voyage :6)
- b. Bendera/IMO Number :7)8)
- c. Ukuran (DWT/GT/HP) :9)
- d. Owner /Principal :10)
- e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :11)
- f. Status :12)
- g. Pelabuhan Singgah :13)
- h. Port Agent / Sub Agent :14)
- i. E T A / ETD :15)
- j. Kegiatan :16)
- k. B/M :17)
- l. Pelabuhan Asal/Tujuan :18)
- m. Crew List/ Kebangsaan :19)

2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
- a. Salinan surat penunjukan keagenan kapal atau surat perjanjian keagenan umum (*letter of appointment / agency agreement*)
 - b. Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule)
 - c. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
 - d. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal (ISSC/SSO/CSO)
 - e. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
 - f. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)
 - g. Salinan Daftar Penumpang (*Passenger List*)
 - h. Salinan sertifikat terkait lainnya sesuai kegiatan kapal asing
2. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Homat Kami

PT.20)
 An. Penanggung Jawab

(.....21)
22)

Tembusan :
 - DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 30

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing
6)	Diisi dengan Nama Kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO
9)	Diisi dengan dead weight tonage, grosse tonage, dan Horse Power
10)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/ yang mewakili pemilik kapal (principal)
11)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
12)	Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.
14)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.
15)	Diisi dengan tanggal rencana kedatangan/ keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
16)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan dengan melampirkan salinan surat pendukung kegiatan dimaksud
17)	Diisi dengan bongkar/muat barang/ jenis muatan di pelabuhan
18)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
19)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
20)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
21)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
22)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut

Contoh 31

Nomor :1),.....2)
 Klasifikasi : Biasa
 Perihal : Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Kepada
 Yth.3)
4)
 Di
5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No.6), tanggal 7), bersama ini disampaikan rencana kedatangan/keberangkatan kapal yang saudara ageni sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal / Voyage :8)
 - b. Bendera/IMO Number :9) /10)
 - c. Ukuran (DWT/GT/HP) :11)
 - d. Owner /Principal :12)
 - e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :13)
 - f. Status :14)
 - g. Pelabuhan Singgah :15)
 - h. Port Agent / Sub Agent :16)
 - i. E T A / ETD :17)
 - j. Kegiatan :18)
 - k. B/M :19)
 - l. Pelabuhan Asal/Tujuan :20)
 - m. Crew List/ Kebangsaan :21)
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, dengan ini disetujui bahwa rencana kedatangan/ keberangkatan kapal asing yang diageni perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan telah dicatat dalam daftar kapal keagenan asing di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
 - b. Mengurus kepentingan kapal asing yang diageni dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan Indonesia;
 - c. Dilarang untuk mengangkut muatan dan/ atau penumpang antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia (*azas cabotage*) serta melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan / atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Permenhub No. PM 48 Tahun 2011;
 - d. Surat ini hanya berlaku sebagai Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus di Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di wilayah perairan Republik Indonesia;
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
 - f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang belum *comply* dengan ketentuan SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code 2002);
 - g. Melaporkan realisasi kegiatan keagenan kapal asing setiap 3 (tiga) bulan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)

.....24)

NIP25)

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy V BIN TNI;
3. Asops KSAL;
4. ASOPS KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat 26);
7. Kacab/GM Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
9. DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 31

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama direktur perusahaan angkutan laut
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan angkutan laut
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan angkutan laut
7)	Diisi dengan tanggal surat perusahaan angkutan laut
8)	Diisi dengan nama kapal
9)	Diisi dengan bendera Kapal
10)	Diisi dengan Nomor IMO
11)	Diisi dengan Dead Weight Tonnage, Grosse Tonnage, dan Horse Power
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/ yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
14)	Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap
15)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
16)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
17)	Diisi dengan tanggal kedatangan/ keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
18)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan
19)	Diisi dengan bongkar/muat barang/ jenis muatan di pelabuhan
20)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
21)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
22)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
24)	Diisi dengan Pangkat/ Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

Contoh 32

LAPORAN REALISASI KEDATANGAN KAPAL ASING YANG DIAGENI/PEMBERITAHUAN KEAGENAN KAPAL ASING (PKKA)

Nama Perusahaan Angkutan Laut :1)
 Alamat Perusahaan :2)
 Nomor SIUPAL / SIOPSUS :3)
 Periode Laporan :4)

NO	NAMA KAPAL	Bendera / IMO	Ukuran			Owner / Principal	Pelabuhan Singgah	ETA / ETD	Pelabuhan Asal / Tujuan	Kegiatan		Jenis Muatan
			DWT	GT	HP					Bongkar	Muat	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

.....18) ,19)
 PT.1)

(.....20)
21)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 32

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
2)	Diisi dengan alamat perusahaan angkutan laut
3)	Diisi dengan nomor SIUPAL / SIOPSUS perusahaan angkutan laut
4)	Diisi dengan periode laporan
5)	Diisi dengan nomor urut
6)	Diisi dengan nama kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal dan nomor IMO
8)	Diisi dengan Dead Weight Tonage
9)	Diisi dengan Grosse Tonage
10)	Diisi dengan Horse Power
11)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
12)	Diisi dengan nama pelabuhan yang disinggahi di Indonesia
13)	Diisi dengan tanggal kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
14)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
15)	Diisi dengan jumlah muatan yang dibongkar
16)	Diisi dengan jumlah muatan yang dimuat
17)	Diisi dengan jenis muatan
18)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
19)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya laporan
20)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
21)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut

Contoh 33

Nomor :1),.....2)
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan *Certificate of Shipowners Representative (COR)*

Kepada
 Yth.3)
4)
 Di
5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan Permohonan *Certificate of Shipowners Representative (COR)* sehubungan dengan adanya tenaga kerja asing di perusahaan kami, dengan data-data sebagai berikut :

- a. Nama :6)
 b. Kebangsaan :7)
 c. Nomor Passpor :8)
 d. Tempat & Tgl Lahir :9)
 e. Jabatan :10)
 f. Alamat :11)
 g. Periode :12)
 h. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS : 13)

Tenaga kerja asing dimaksud yang bekerja di perusahaan kami menjadi tanggung jawab kami.

2. Untuk melengkapi permohonan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
- a. Salinan surat penunjukan sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang diketahui Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia di negara bersangkutan bagi warga negara asing;
 b. Salinan kartu izin tinggal sementara dari instansi terkait bagi warga negara asing;
 c. Salinan Rekomendasi dari Kemenaker
 d. Salinan daftar riwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagai perwakilan;
 e. Salinan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang, dan
 f. Salinan sertifikat keahlian, sesuai posisi yang diajukan
 g. Pas photo terbaru;
 h. memiliki surat keterangan sudah melunasi pajak tahun terakhir dan NPWP yang masih berlaku
3. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT.14)
 An. Penanggung Jawab

(.....15)
16)

Tembusan :
 - DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 33

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan <i>Certificate of Shipowners Representative</i>
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan <i>Certificate of Shipowners Representative</i> (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan <i>Certificate of Shipowners Representative</i> (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan <i>Certificate of Shipowners Representative</i>
6)	Diisi dengan nama orang yang ditunjuk sebagai <i>Owner Representative</i>
7)	Diisi dengan kebangsaan orang yang ditunjuk sebagai <i>Owner Representative</i>
8)	Diisi dengan nomor passpor orang yang ditunjuk sebagai <i>Owner Representative</i>
9)	Diisi dengan tempat tanggal lahir orang yang ditunjuk sebagai <i>Owner Representative</i>
10)	Diisi dengan jabatan orang yang ditunjuk sebagai <i>Owner Representative</i>
11)	Diisi dengan alamat orang yang ditunjuk sebagai <i>Owner Representative</i>
12)	Diisi dengan tanggal berlakunya masa kerja orang yang ditunjuk sebagai <i>Owner Representative</i>
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS perusahaan angkutan laut yang mengajukan <i>Certificate of Shipowners Representative</i>
14)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut yang mengajukan <i>Certificate of Shipowners Representative</i> .
15)	Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab perusahaan angkutan laut yang mengajukan <i>Certificate of Owners Representative</i>
16)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan angkutan laut yang mengajukan <i>Certificate of Owners Representative</i>

Contoh 34

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA Lt. 12 s/d 17
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Telp. 38 11308 Ps.: 4114, 4223, 4227
JAKARTA**

CERTIFICATE OF OWNER'S REPRESENTATIVEUNTUK YANG BERKEPENTINGANTO WHOM IT MAY CONCERN

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia di Jakarta, berdasarkan PERMENHUB No. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, menyatakan dan meresmikan tuan tersebut di bawah ini :

The Director General of Sea Transportation of the Republic of Indonesia, based on Minister of Transportation's Decree No..... year regarding The Operation dan Business of Sea Transport, certify and legalize undermentioned gentleman

Nama/Name :1)
Kebangsaan/Nationality :2)
Kantor/Office :3)
.....4)
.....5)

Sebagai Perwakilan Perusahaan Angkutan Laut Asing dari :

As Owner's Representative of :

"6)"

dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut R.I

And has been duly registered at the Directorate General of Sea Transportation of the Republic of Indonesia.

SERTIFIKAT INI DIBUAT DI JAKARTA DAN BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN SEMENJAK TANGGAL
.....7)

This certificate is issued in Jakarta and valid for : 1 (one) year effective from
.....7)

Ketentuan :

Conditions :

Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia dilarang melakukan kegiatan keagenan.

Shipowner's Representative is prohibited to carry out agency activities.

Perwakilan perusahaan angkutan laut asing diwajibkan melaporkan kegiatannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut d.h.i Direktorat Lalu lintas dan Angkutan Laut minimal sekali dalam 6 bulan sebagai Prasyarat perpanjangan sertifikat.

Shipowner's Representative is obliged to report to the Director General of Sea Transportation Cq. Directorate of Traffic and Sea Transport regarding their activities minimum every six (6) months as precondition for the renewal of this certificate.

Foto yang bersangkutan

Jakarta,

Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Director General of Sea Transportation

untuk beliau/*on behalf*
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Director of Sea Traffic and Transport

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 34

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama orang yang ditunjuk sebagai <i>Owner's Representative</i>
2)	Diisi dengan kebangsaan orang yang ditunjuk sebagai <i>Owner's Representative</i>
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut yang mengajukan <i>Certificate of Owner's Representative</i>
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut yang mengajukan <i>Certificate of Owner's Representative</i>
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan angkutan laut yang mengajukan <i>Certificate of Owner's Representative</i>
6)	Diisi dengan nama perusahaan asing yang menunjuk <i>Owner's Representative</i>
7)	Diisi dengan tanggal berlakunya masa kerja orang yang ditunjuk sebagai <i>Owner's Representative</i>
8)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan <i>Certificate of Owner's Representative</i> (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
9)	Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
10)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

Contoh 35

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus Yth. Kepada 3)
 4)
 di5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

- a. Nama Kapal :6)
- b. Nomor Pendaftaran :7)
- c. Tipe :8)
- d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) :9)
- e. Tenaga Penggerak (HP) :10)
- f. Kapasitas Angkut :11)
- g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
- h. Pelabuhan Singgah :12)
- i. Urgensi :13)
- j. Nomor dan Tanggal SIOPSUS :14)
- k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal :15)
- l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya :16)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
 - b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.
2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 17)
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 18)
 An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 35

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 36

Nomor : 1), 2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

Yth. Kepada
 Direktur Utama PT..... 3)
 Jl. 4)
 di
5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal..., dan menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal :6)
 - b. Nomor Pendaftaran :7)
 - c. Tipe :8)
 - d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) :9)
 - e. Tenaga Penggerak (HP) :10)
 - f. Kapasitas Angkut :11)
 - g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
 - h. Kode Trayek :12)
 - i. Pelabuhan Pangkal :13)
 - j. Route Trayek :14)
 - k. Urgensi :15)
 - l. Nomor dan Tanggal SIOPSUS :16)
 - m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal :17)
 - n. Nomor dan Tanggal Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya :18)
3. Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur ini berlaku dari tanggal..... sampai dengan 19), selain itu saudara wajib memperhatikan :
 - a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
 - b. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;
 - c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
 20)
 21)
 22)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 36

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
15)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
21)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
22)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 37

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Rencana Penambahan Pelabuhan Singgah Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

Yth. Kepada 3)
 Jl. 4)
 di
5)

2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data sebagai berikut :

- | | | |
|---|----------------|-----|
| a. Nama Kapal | : | 6) |
| b. Nomor Pendaftaran | : | 7) |
| c. Tipe | : | 8) |
| d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) | : | 9) |
| e. Tenaga Penggerak (HP) | : | 10) |
| f. Kapasitas Angkut | : | 11) |
| g. Status Kepemilikan Kapal | : milik / sewa | |
| h. Pelabuhan singgah | : | 12) |
| i. Urgensi | : | 13) |
| j. Nomor dan Tanggal SIOPSUS | : | 14) |
| k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal | : | 15) |
| l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya | : | 16) |

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- | | |
|---|--|
| a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik); | |
| b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya. | |
2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 1 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 17)
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 18)
 An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 37

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

LONTON 38

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Penambahan Pelabuhan Singgah Pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus

Kepada
 Yth. Direktur Utama PT.....3)
4)
 Jl.5)

di-
6)

1. Menunjuk surat Saudara No.7) tanggal8) perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No.9) tanggal10) perihal pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus untuk kapal11).
6. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan pelabuhan singgah12).
7. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No.....13) tanggal14) perihal pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus untuk kapal15).
4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

16)
17)

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 18)
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan setempat. 19)

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN CONTOH 38

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
9)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
11)	Diisi dengan nama kapal
12)	Diisi dengan pelabuhan singgah
13)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.
15)	Diisi dengan nama kapal
16)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
17)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 39

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Rencana Penambahan Urgensi Muatan pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus. Yth. Kepada 3)
 Jl. 4)
 di
5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal, bersama ini kami menyampaikan laporan rencana penambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--|----------------|-----|
| a. | Nama Kapal | : | 6) |
| b. | Nomor Pendaftaran | : | 7) |
| c. | Tipe | : | 8) |
| d. | Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) | : | 9) |
| e. | Tenaga Penggerak (HP) | : | 10) |
| f. | Kapasitas Angkut | : | 11) |
| g. | Status Kepemilikan Kapal | : milik / sewa | |
| h. | Jenis Muatan Umum yang dimuat | : | 12) |
| i. | Pelabuhan Asal | : | 13) |
| j. | Pelabuhan Tujuan | : | 14) |
| k. | Nomor dan Tanggal SIOPSUS | : | 15) |
| l. | Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal | : | 16) |
| m. | Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya | : | 17) |

2. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 18)
 An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN CONTOH 39

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (General Cargo).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang memberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (General Cargo).
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan jenis muatan umum yang dimuat
13)	Diisi dengan pelabuhan asal
14)	Diisi dengan pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 40

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan Penambahan Urgensi Muatan

Kepada
 Yth. Direktur Utama PT.....3)
4)
 Jl.5)
 di-
6)

1. Menunjuk surat Saudara No.7) tanggal8) perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No.9) tanggal10) perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal11).
8. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan urgensi muatan12).
9. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No.....13) tanggal14) perihal pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus untuk kapal15).
4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 16)
17)

Tembusan Yth. :
 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut; 18)
 2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
 3. Badan Usaha Pelabuhan setempat. 19)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 40

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nomor surat permohonan
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tanggal surat permohonan
9)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
10)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
11)	Diisi dengan nama kapal
12)	Diisi dengan penambahan urgensi muatan
13)	Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
14)	Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur.
15)	Diisi dengan nama kapal
16)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
17)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 41

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Izin Mengangkut Muatan Umum Kepada
 Atau Barang Milik Pihak Lain pada Trayek Tidak Tetap Yth.3)
 dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus Jl.4)
 di
5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan permohonan izin mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal :6}
 - b. Nomor Pendaftaran :7}
 - c. Tipe :8}
 - d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) :9}
 - e. Tenaga Penggerak (HP) :10}
 - f. Kapasitas Angkut :11}
 - g. Status Kepemilikan Kapal : milik / sewa
 - h. Pelabuhaninggah :12}
 - i. Urgensi :13}
 - j. Nomor dan Tanggal SIOPSUS :14}
 - k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal :15}
 - l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya :16}

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- a. Salinan SIOPSUS;
 - b. Salinan Spesifikasi kapal/Surat Laut;
 - c. Salinan Rencana Pengoperasian Kapal;
 - d. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);
 - e. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.
2. Rencana pelaksanaan pengangkutan ini diajukan untuk 1 (satu) kali jalan dari pelabuhan ke pelabuhan mulai tanggal s.d17}
 3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 18}
 An. Penanggung Jawab

(.....) 19)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP INSA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 41

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
13)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 42

Nomor : 1), 2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Mengangkut Muatan Umum
 atau Barang Milik Pihak Lain pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Khusus

Kepada
 Yth. Direktur Utama PT 3)
 Jl. 4)
 di
5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal..., dan menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal permohonan izin mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara diberikan Izin untuk mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data kapal sebagai berikut :

- | | |
|--|----------------|
| a. Nama Kapal | :6) |
| b. Nomor Pendaftaran | :7) |
| c. Tipe | :8) |
| d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) | :9) |
| e. Tenaga Penggerak (HP) | :10) |
| f. Kapasitas Angkut | :11) |
| g. Status Kepemilikan Kapal | : milik / sewa |
| h. Kode Trayek | :12) |
| i. Pelabuhan Pangkal | :13) |
| j. Route Trayek | :14) |
| k. Urgensi | :15) |
| l. Nomor dan Tanggal SIOPSUS | :16) |
| m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal | :17) |

3. izin mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus ini diberikan untuk 1 (satu) kali jalan dari pelabuhan ke pelabuhan 18) dan berlaku dari tanggal sampai dengan 19), dan Saudara harus memperhatikan :

- Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
- Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;
- Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)

..... 22)

Tembusan :

- Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
- Pimpinan Badan Usaha Pelabuhan Setempat

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 42

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8)	Diisi dengan tipe kapal
9)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
15)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
17)	Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18)	Diisi dengan pelabuhan tujuan
19)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
21)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
22)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 42

Nomor :1),.....2)
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing Kepada
 Untuk Kegiatan Angkutan Laut Khusus Yth.3)
4)
 Di
5)

Dengan hormat,

1. Menunjuk PERMENHUB No. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan rencana Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus, dengan data-data sebagai berikut :

- a. Nama Kapal / Voyage :6)
 b. Bendera/IMO Number :7)8)
 c. Ukuran (DWT/GT/HP) :9)
 d. Owner /Principal :10)
 e. Nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS :11)
 f. Status :12)
 g. Pelabuhan Singgah :13)
 h. Port Agent / Sub Agent :14)
 i. E T A / ETD :15)
 j. Kegiatan :16)
 k. BM :17)
 l. Pelabuhan Asal/Tujuan :18)
 m. Crew List/ Kebangsaan :19)

3. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
- a. Salinan surat penunjukan keagenan kapal atau surat perjanjian keagenan umum (*letter of appointment / agency agreement*)
 b. Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule)
 c. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
 d. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal (ISSC/SSO/CSO)
 e. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *)
 f. Salinan Daftar Awak Kapal (*Crew List*)
 g. Salinan Daftar Penumpang (*Passenger List*)
 h. Salinan sertifikat terkait lainnya sesuai kegiatan kapal asing
2. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.

Homat Kami

PT.20)
 An. Penanggung Jawab

(.....21)
22)

Tembusan :
 - DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 43

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing
6)	Diisi dengan Nama Kapal
7)	Diisi dengan bendera Kapal
8)	Diisi dengan Nomor IMO
9)	Diisi dengan dead weight tonage, grosse tonage, dan Horse Power
10)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)
11)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS
12)	Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap
13)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.
14)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.
15)	Diisi dengan tanggal rencana kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
16)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan dengan melampirkan salinan surat pendukung kegiatan dimaksud
17)	Diisi dengan bongkar/muat barang/jenis muatan di pelabuhan
18)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
19)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
20)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
21)	Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut
22)	Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut

Contoh 43

Nomor :1),.....2)
 Klasifikasi : Biasa
 Perihal : Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Kepada
 Kegiatan Angkutan Laut Khusus
 Yth.3)
4)
 Di
5)

1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No.6), tanggal 7), bersama ini disampaikan rencana kedatangan/keberangkatan kapal yang saudara ageni sebagai berikut :
 - a. Nama Kapal / Voyage :8)
 - b. Bendera/IMO Number :9) /10)
 - c. Ukuran (DWT/GT/HP) :11)
 - d. Owner /Principal :12)
 - e. Nomor dan tanggal SIOPSUS :13)
 - f. Status :14)
 - g. Pelabuhan Singgah :15)
 - h. Port Agent / Sub Agent :16)
 - i. E T A / ETD :17)
 - j. Kegiatan :18)
 - k. BM :19)
 - l. Pelabuhan Asal/Tujuan :20)
 - m. Crew List/ Kebangsaan :21)
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) diatas, dengan ini disetujui bahwa rencana kedatangan/ keberangkatan kapal asing yang diageni perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan telah dicatat dalam daftar kapal keagenan asing di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun internasional;
 - b. Mengurus kepentingan kapal asing yang diageni dan bertanggung jawab atas biaya kapal selama berada di pelabuhan Indonesia;
 - c. Dilarang untuk mengangkut muatan dan/ atau penumpang antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia (*azas cabotage*) serta melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan / atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Permenhub No. PM 48 Tahun 2011;
 - d. Surat ini hanya berlaku sebagai Laporan Keagenan Kapal Asing (PKKA) bagi kapal asing yang melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus di Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di wilayah perairan Republik Indonesia;
 - e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
 - f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang belum *comply* dengan ketentuan SOLAS 1974 Chapter XI-2 (ISPS Code 2002);
 - g. Melaporkan realisasi kegiatan keagenan kapal asing setiap 3 (tiga) bulan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....22)

(.....23)

.....24)

NIP.....25)

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy V BIN TNI;
3. Asops KSAL;
4. ASOPS KSAL;
5. Kepala BAIS TNI;
6. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
7. Pimpinan BUP Setempat
8. DPP INSA

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 44

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Laporan Keagenan Kapal Asing (LKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat
3)	Diisi dengan nama direktur perusahaan angkutan laut
4)	Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan angkutan laut
6)	Diisi dengan nomor surat perusahaan angkutan laut
7)	Diisi dengan tanggal surat perusahaan angktan laut
8)	Diisi dengan nama kapal
9)	Diisi dengan bendera Kapal
10)	Diisi dengan Nomor IMO
11)	Diisi dengan Dead Weight Tonage, Grosse Tonage, dan Horse Power
12)	Diisi dengan status kepemilikan kapal/ yang mewakili pemilik kapal (principal)
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS
14)	Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap
15)	Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
16)	Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegiatannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia
17)	Diisi dengan tanggal kedatangan/ keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
18)	Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan
19)	Diisi dengan bongkar/muat barang/ jenis muatan di pelabuhan
20)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
21)	Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal
22)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
23)	Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
24)	Diisi dengan Pangkat/ Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
25)	Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)
26)	Diisi dengan Adpel / OP / UPP / Kabidala & Kepelabuhanan yang bersangkutan

Contoh 45

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri. Kepada Yth. 3)
 Jl. 4)
 di5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pelra dengan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

- | | | |
|---|----------------|-----|
| a. Nama Kapal | : | 6) |
| b. Tipe | : | 7) |
| c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) | : | 8) |
| d. Tenaga Penggerak (HP) | : | 9) |
| e. Kapasitas Angkut | : | 10) |
| f. Status Kepemilikan Kapal | : milik / sewa | |
| g. Kode Trayek | : | 11) |
| h. Pelabuhan Pangkal | : | 12) |
| i. Route Trayek | : | 13) |
| j. Urgensi | : | 14) |
| k. Nomor dan Tanggal SIUPER | : | 15) |
| l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya | : | 16) |

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- | |
|---|
| a. Salinan SIUPER; |
| b. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal; |
| c. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik); |
| d. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya; |
| e. Salinan Rencana Pengoperasian Kapal. |
2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 17)
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 18)
 An. Penanggung Jawab
 (.....) 19)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP PELRA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 45

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan pelayaran rakyat
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)
8)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK / HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
12)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
13)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
14)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama perusahaan
19)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 46

Nomor : 1), 2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal Kepada
 Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Yth. Direktur Utama PT..... 3)
 Angkutan Laut Dalam Negeri Jl. 4)

di

.....5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal...., dan menunjuk surat Saudara nomor tanggal perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada pelayaran rakyat nasional dan dioperasikan pada trayek tetap dan teratur dengan data kapal sebagai berikut :

a. Nama Kapal	:	6)
b. Tipe	:	7)
c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)	:	8)
d. Tenaga Penggerak (HP)	:	9)
e. Kapasitas Angkut	:	10)
f. Status Kepemilikan Kapal	: milik / sewa	
g. Kode Trayek	:	11)
h. Pelabuhan Pangkal	:	12)
i. Route Trayek	:	13)
j. Urgensi	:	14)
k. Nomor dan Tanggal SIUPER	:	15)
l. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya	:	16)
3. Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur ini berlaku dari tanggal..... sampai dengan 17) Apabila kapal yang dioperasikan tidak menyinggahi pelabuhan secara tetap dan teratur dengan berjadwal, maka akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pelayaran rakyat, selain itu saudara wajib memperhatikan :
 - a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;
 - b. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;
 - c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20)

..... 21)

..... 22)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
3. Pimpinan Badan Usaha Pelabuhan Setempat

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 46

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)
8)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK / HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
12)	Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
13)	Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
14)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
15)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
16)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
17)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
18)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
19)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
20)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 47

Nomor :1),2}
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian
 Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Yth. Kepada 3}
 Tidak Teratur Angkutan Laut 4}
 Dalam Negeri.
 di
5}

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

- | | |
|---|----------------|
| a. Nama Kapal |6} |
| b. Tipe |7} |
| c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) |8} |
| d. Tenaga Penggerak (HP) |9} |
| e. Kapasitas Angkut |10} |
| f. Status Kepemilikan Kapal | : milik / sewa |
| g. Pelabuhan |11} |
| h. Urgensi |12} |
| i. Nomor dan Tanggal SIUPER |13} |
| j. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya | :
.....14} |

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- | |
|---|
| a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik); |
| b. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya. |
2. Rencana pengoperasian kapal pelra ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 15)
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 PT. (.....) 16}
 An. Penanggung Jawab

(.....) 17)

Tembusan :
 Ketua Umum DPP PELRA .

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 47

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan pelayaran rakyat
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
4)	Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)
8)	Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK / HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi
12)	Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
15)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
16)	Diisi dengan nama perusahaan
17)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 48

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

Yth. Kepada PT 3)
 Jl. 4)
 di5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

- | | | | |
|----|--|----------------|-----|
| a. | Nama Kapal | : | 6) |
| b. | Tipe | : | 7) |
| c. | Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) | : | 8) |
| d. | Tenaga Penggerak (HP) | : | 9) |
| e. | Kapasitas Angkut | : | 10) |
| f. | Status Kepemilikan Kapal | : milik / sewa | |
| g. | Pelabuhansinggah | : | 11) |
| h. | Urgensi | : | 12) |
| i. | Nomor dan Tanggal SIUPER | : | 13) |
| j. | Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya | : | 14) |

Untuk melengkapi laporan tertampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

- | | |
|----|--|
| a. | Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik); |
| b. | Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya. |
2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal s.d. tanggal 15)
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

..... 16)

..... 17)

..... 18)

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
 2. Kepala Kantor Syahbandar Setempat;
 3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
 4. Pimpinan Badan Usaha Pelabuhan Setempat
-

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 48

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan tipe kapal
8)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
9)	Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
10)	Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
11)	Diisi dengan pelabuhan singgah
12)	Diisi dengan urgensi
13)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
14)	Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal periode sebelumnya
15)	Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
16)	Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
17)	Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
18)	Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin

Contoh 49

LAPORAN REALISASI PERJALANAN KAPAL (VOYAGE REPORT)

Nama Perusahaan Pelayaran Rakyat : PT. Nama Kapal :
 Alamat Perusahaan : Bendera /Status Kapal :
 T e l e p o n : Type/Ukuran Kapal :
 Periode Laporan : Kecepatan Ekonomis :
 Status Tryek : Liner/Tramper *)

Pelabuhan Asal	Tiba		Berangkat		Jarak Mil	Waktu Berlayar			Waktu Yang di Perlukan			Pelabuhan Tujuan	Pemuatan/Pemberangkatan							
	Tgl	Jam	Tgl	Jam		Hari	Jam	Hari	Jam	Waktu Yang di Perlukan	B/M		Ton 1000 Kg	Ukuran (M3)	Pemumpang	Hewan	Jenis Barang	Kemasan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

PERCATAN :
 Keterlambatan handling oleh karena muatan, menunggu tongkang/truck, kerusakan kapal dsd.,20 ...
 Diperlukan : karena PT.
 Dilaut (karena cuaca, kerusakan mesin dsb) (.....)

II. DAFTAR JENIS MUATAN

1. Beras	17. Minyak Goreng	32. Barang Kerajinan	48. Kaolin	64. Ikan Asia
2. Gula Pasir	18. Sayur-sayuran	33. Soda ash	49. Nikel	65. Rumput Laut
3. Gandum	19. Buah-buahan	34. Zat asam	50. Aluminium	66. Hasil Laut Lainnya
4. Tepung Terigu	20. Kapas	35. Mesin-mesin	51. Batubara	67. Sapi
5. Kedelai	21. Hasil Pertanian dan Perkebunan lainnya	36. Makanan Ternak	52. Pasir Kwarsa	68. Kerbau
6. Kacang-kacangan	22. Pupuk	37. Baja/Besi Beton	53. Pasir Besi	69. Kulit Hewan
7. Lada	23. Semen	38. Kertas	54. Pasir Lain	70. Kulit TernakLainnya
8. Cengkeh	24. Garmen	39. Makanan/Minuman	55. Kliniker	Penumpang Umum
9. Rempah-rempah	25. Tekstil	40. Hasil Perindustrian lainnya	56. Hasil Pertambangan	71. Transmigrasi
10. Kopi	26. Elektronik	41. Crude Oil	57. Logos	72. Turis
11. Tembakau	27. Gaplek	42. Bahan Bakar Minyak	58. Kayu Gergaji	73. TKI
12. Kakao	28. Kedaraan	43. Gas/LNG	59. Kayu Lapis	74. Lain-lain
13. Teh	29. Furniture	44. Aspal	60. Rotan	
14. Karet	30. Garam	45. Timah	61. Hasil Hutan Lainnya	
15. Kopra	31. Bahan Kimia	46. Bauksit	62. Ikan	
16. Minyak Sawit		47. Tembaga	63. Udang	

III. DAFTAR JENIS KEMASAN

1. Bag. (pak/karung)	5. Drum	9. Dry Bulk
2. Case (Peti)	6. Pallet	10. Liquid Bulk
3. Bale (bal/bundal)	7. Petikemas	11. lain-lain
4. Barel (Kalieng)	8. Barge	

III. DAFTAR TYPE KAPAL

1. Konvensional	5. Tongkang	9. Bulk (curah)
2. Container (Petikemas)	6. Roro	10. Tanker
3. Semi Containiner (Petikemas)	7. Tunda	11. Lash
4. Landing Craft	8. Penumpang	12. Ikan

13. Kapal Layar (1)
14. Kapal layar Motor(1)
15. Kapal Motor (1)
16. Lain-lain

Contoh 50

**LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL PELAYARAN RAKYAT
DI PELABUHAN**

PT. PERUSAHAAN PELAYARAN RAKYAT (PUSAT/CABANG)*)

JALAN :
TELEPON :

BULAN :

NO	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK(*)	STATUS KAPAL(M/C/K)*)
		TGL	DARI PELAB.			TGL	KE PELAB.				

*) Coret yang tidak perlu

..... tanggal

GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA

- L : Liner
- T : Tramber
- M : Milik
- C : Charter
- K : Keagenan

Contoh 51

.....1)
2)

Nomor : 3) 4),5)
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Surat Kepada
 Izin Usaha Perusahaan Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 Angkutan Laut (SIUPAL) Jl. Medan Merdeka Barat No.8
 di
JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah disahkan KEMENKUMHAM;
 - b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
 - c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
 - d. Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang di legalisir;
 - e. Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.
4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. 6)

Tembusan :
 - Menhub RI.

..... 7)
 8)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 51

NO	URAIAN
1.	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
2.	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.
3.	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.
4.	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.
5.	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.
6.	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
7.	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
8.	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.

Contoh 52

Nomor :1) Jakarta,2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Penundaan Izin Usaha Kepada
 Perusahaan Angkutan Laut

Yth. Direktur Utama
 PT.3)
4)

di

..... 5)

1. Menunjuk surat Saudara No.6) tanggal7) perihal permohonan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No. tahun yaitu:
 - a. 8)
 - b.
3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

..... 9)
10)

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
2. Kasubbag TU Ditlala.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 52

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
8)	Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin usaha.
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
10)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 53

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT (SIUPAL)

(Berdasarkan PP No.20 Tahun 2010 Jo. PP No.22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan)

NOMOR : 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor2) tanggal.....3) diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada :

Nama Perusahaan	:	4)
Alamat Kantor Perusahaan	:	5)
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab	:	6)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab	:	7)
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	8)
Nilai Modal Perusahaan	:	9)
Status Perusahaan	:	10)

Kewajiban Pemegang SIUPAL :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi/Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPAL ini.
5. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau trampoer melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
8. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
9. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna/calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 ke atas.
10. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 11)

Penanggung Jawab

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

..... 14)
..... 15)

..... 12)
..... 13)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 53

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat izin usaha.
2)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
4)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
6)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemohon izin usaha.
7)	Diisi dengan alamat penanggung jawab perusahaan pemohon izin usaha.
8)	Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin usaha
9)	Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemohon izin usaha.
10)	Diisi dengan status perusahaan pemohon izin usaha (PMDN / PMA).
11)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin usaha.
12)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
14)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
15)	Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan.

Contoh 54

Nomor :1) Jakarta,2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Penundaan Perubahan Status Perusahaan (*Joint Venture*) Kepada

Yth. Direktur Utama
 PT.3)
4)

di

..... 5)

1. Menunjuk surat Saudara No.6) tanggal7) perihal permohonan perubahan status perusahaan pada Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).
2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No. tahun yaitu:
 - a. 8)
 - b.
3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

..... 9)
10)

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
2. Kasubbag TU Ditlala.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 54

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
8)	Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin usaha.
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
10)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 55

Nomor :(1),(2)
 Klasifikasi :
 Lampiran : 1 (satu) berkas.
 Perihal : Surat Keterangan Perubahan Status Perusahaan.

Kepada

Yth. Direktur Utama
 PT.

.....(3)

Jl.(4)

di

.....(5)

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :(6) tanggal(7), perihal Permohonan Perubahan/Pengalihan SIUPAL, bersama ini terlampir disampaikan Surat Keterangan tentang Perubahan status Perusahaan pada SIUPAL PT..... (8)
2. Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....(9)

.....(10)

.....(11)

.....(12)

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
1. Seditjen Hubla;
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan
(13)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 55

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (Gubernur / Bupati / Walikota).
(2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
(3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
(4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.
(5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan..
(7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan..
(8)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(9)	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
(10)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
(11)	Diisi dengan pangkat / golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
(12)	Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
(13)	Diisi dengan domisili Kantor Otoritas Pelabuhan setempat.

Contoh 56

SURAT KETERANGAN

No.

1. Berdasarkan surat PT.(1) Nomor :(2) tanggal(3), perihal Permohonan Perubahan status perusahaan, sesuai akta perubahan No.(4) tanggal(5), notaris(6) di(7), serta Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dari Perusahaan Non Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri (Non PMA/PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing No :(8) tanggal(9), dengan ini diadakan Perubahan Status Perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan :(10)
 Nomor & Tgl. SIUPAL :(11)
 Domisili Perusahaan :(12)
 Penanggung Jawab dan Jabatan Lama :(13)
 Penanggung Jawab dan Jabatan Baru :(14)
 Alamat Penanggung Jawab :(15)
 Status Perusahaan Lama :(16)
 Status Perusahaan Baru :(17)

2. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT.(1) No.....(18) tanggal(19), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan dan Keputusan Menteri Perhubungan No.KM.....Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,

.....(20)

.....(21)

.....(22)

.....(23)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 56

NO	URAIAN
(1)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(2)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(4)	Diisi dengan nomor akte perubahan dari notaris.
(5)	Diisi dengan tanggal akte perubahan dari notaris.
(6)	Diisi dengan nama notaris yang menerbitkan akte perubahan.
(7)	Diisi dengan domisili notaris.
(8)	Diisi dengan nomor surat persetujuan yang menerangkan perubahan status perusahaan.
(9)	Diisi dengan tanggal surat persetujuan yang menerangkan perubahan status perusahaan.
(10)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(11)	Diisi dengan nomor dan tanggal izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(12)	Diisi dengan domisili perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(13)	Diisi dengan nama penanggung jawab lama dan jabatannya.
(14)	Diisi dengan nama penanggung jawab baru dan jabatannya.
(15)	Diisi dengan alamat penanggung jawab baru.
(16)	Diisi dengan status perusahaan lama.
(17)	Diisi dengan status perusahaan baru.
(18)	Diisi dengan nomor izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(19)	Diisi dengan tanggal izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.
(20)	Diisi dengan nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
(21)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
(22)	Diisi dengan pangkat / golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
(23)	Diisi dengan pangkat / golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

Contoh 57

.....1)
2)

Nomor : 3) 4),5)
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Surat Kepada
 Izin Usaha Perusahaan Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
 Pelayaran-Rakyat (SIUPER) Jl.

di

JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER).
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah disahkan KEMENKUMHAM;
 - b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
 - c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
 - d. Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang di-legalisir;
 - e. Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.
4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. 6)

Tembusan :

1. Menhub RI
2. Dirjen Hubla
3. DPP Pelra

..... 7)
 8)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 57

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
2)	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.
3.	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.
4.	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.
5.	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.
6.	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
7.	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
8.	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.

Contoh 58

Nomor :1) Jakarta,2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Penundaan Izin Usaha Kepada
 Perusahaan Angkutan Laut Yth. Direktur Utama
 Pelayaran-Rakyat (SIUPER) PT.3)
4)
 di
 5)

1. Menunjuk surat Saudara No.6) tanggal7) perihal permohonan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER).
2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No. tahun yaitu:
 - c. 8)
 - d.
3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

..... 9)
10)

Tembusan :
 1. Dirjen Hubla;
 2. DPP Pelra.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 58

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
8)	Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin usaha.
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
10)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 59

**PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN...../KOTAMADYA...
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl.

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT (SIUPER)

(Berdasarkan PM No. Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut)

NOMOR : 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor2) tanggal.....3) diberikan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER) kepada :

Nama Perusahaan	:	4)
Alamat Kantor Perusahaan	:	5)
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab	:	6)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab	:	7)
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	8)
Nilai Modal Perusahaan	:	9)

Kewajiban Pemegang SIUPER :

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Pemberi Izin.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Pemberi Izin setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUPER ini.
5. Mengumumkan jadwal baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalui media massa ataupun organisasi yang mempertemukan kepentingan pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.
6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Pemberi Izin.
7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pemberi Izin.
8. Menyampaikan laporan kinerja keuangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pemberi Izin.

SIUPER ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Penanggung Jawab

PEMERINTAH PROVINSI

..... 14)
..... 15)

..... 12)
..... 13)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 59

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor surat izin usaha.
2)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
4)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.
5)	Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
6)	Diisi dengan nama Direktur Utama (penanggung jawab) perusahaan pemohon izin usaha.
7)	Diisi dengan alamat Direktur Utama penanggung jawab perusahaan pemohon izin usaha.
8)	Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin usaha
9)	Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemohon izin usaha.
10)	Diisi dengan nama tempat/kota surat izin usaha dikeluarkan.
11)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin usaha.
12)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
14)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
15)	Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan.

LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

Nomor :1),2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) Pelra Yth. Kepada3)
4)
 di5)

Menunjuk Permenhub No. PM....., dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba dipelabuhan Kapal Pelayaran Rakyat Milik / Charter / Keagenan *) sebagai berikut :

1. Nama Kapal / Voyage :6)
2. DWT / GT :7)
3. Draft :8)
4. LOA :9)
5. Pemilik / Principle :10)
6. Nama Agen :11)
7. Nama Nakhoda :12)
8. Trayek : Tetap dan Teratur / Tidak Tetap dan Tidak Teratur *)
9. Jenis Pelayaran : SIUPAL / SIOPSUS / SIUPER *)
10. ETA / ETD :13)
11. Pelabuhan Asal / Tujuan : Dari Tujuan14)
12. Posisi Kapal Sekarang :15)
13. Tambat / Labuh yang diminta : Sesuai dengan kondisi masing-masing Pelabuhan *)
14. Jenis barang yang akan di :
 a. Bongkar :16)
 b. Muat :17)
15. Rencana Kerja Bongkar Muat :18)
17. Jenis Barang (sesuai manifest) :19)

Uraian		Bongkar		Muat	
a.	General Cargo (brg. Campuran)	T/M3	T/M3
b.	Bag. Cargo (brg. Karungan)	T/M3	T/M3
c.	Bulk Cargo (brg curah)	T/M3	T/M3
d.	Barang berbahaya	T/M3	T/M3
e.	Lain-lain	T/M3	T/M3
	Jumlah	T/M3	T/M3
	Penumpang Naik/Turun	Org	Org
	Hewan turun	Ekor	Ekor

Diisi20) No. / /Lala/21)

Mengetahui,

A.N22)

.....23)

Perusahaan Pelayaran

.....24)
 Pimpinan

Tembusan :

1. Kabid Lala & Kepelab;
2. Kabid Gamat.....
3. Pelindo setempat
4. PPSA

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 60

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3)	Diisi dengan nama kepala OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
4)	Diisi dengan alamat kantor OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
5)	Diisi dengan nama kota kantor OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
6)	Diisi dengan nama kapal.
7)	Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
8)	Diisi dengan draft maksimal kapal
9)	Diisi dengan panjang kapal
10)	Diisi dengan nama pemilik/principle kapal
11)	Diisi dengan nama agen
12)	Diisi dengan nama nahkoda
13)	Diisi dengan perkiraan waktu kedatangan kapal di pelabuhan asal dan waktu keberangkatan ke pelabuhan tujuan
14)	Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan
15)	Diisi dengan posisi kapal labuh dengan mencantumkan titik koordinat
16)	Diisi dengan nama PBM yang ditunjuk dalam pelaksanaan bongkar muat
17)	Diisi dengan rencana kerja bongkar muat
18)	Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
19)	Diisi dengan OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie Lala
20)	Diisi dengan nomor surat UPT yang bersangkutan
21)	
22)	Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
23)	Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan
24)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan

Contoh 61

**LAPORAN BULANAN KEGIATAN KUNJUNGAN KAPAL PELRA
DI PELABUHAN**

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PELAYARAN RAKYAT (PUSAT/CABANG*)

JALAN :
TELEPON :

BULAN :

NO	NAMA KAPAL	DATANG		BONGKAR TON/M3	JENIS BARANG	BERANGKAT		MUAT TON/M3	JENIS BARANG	STATUS TRAYEK(*)	STATUS KAPAL(M/C/K)*)
		TGL	DARI PE-LAB.			TGL	KE PELAB.				

*) Coret yang tidak perlu

..... tanggal

PT. PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT PELRA

.....
Kepala

Keterangan:
L : Liner
T : Transper
M : Milik

I. DAFTAR JENIS MUATAN

1. Beras	17. Minyak Goreng	32. Barang Kerajinan	48. Kaolin	64. Ikan Asia
2. Gula Pasir	18. Sayur-sayuran	33. Soda ash	49. Nikel	65. Rumput Laut
3. Gandum	19. Buah-buahan	34. Zat asam	50. Aluminium	66. Hasil Laut Lainnya
4. Tepung Terigu	20. Kapas	35. Mesin-mesin	51. Batubara	67. Sapi
5. Kedelai	21. Hasil Pertanian dan Perkebunan lainnya	36. Makanan Ternak	52. Pasir Kwarsa	68. Kerbau
6. Kacang-kacangan	22. Pupuk	37. Baja/Besi Beton	53. Pasir Besi	69. Kulit Hewan
7. Lada	23. Semen	38. Kertas	54. Pasir Lain	70. Kulit Ternak Lainnya
8. Cengkeh	24. Garmen	39. Makanan/Minuman	55. Klinker	Penumpang Umum
9. Rempah-rempah	25. Tekstil	40. Hasil Perindustrian lainnya	56. Hasil Pertambangan	71. Transmigrasi
10. Kopi	26. Elektronik	41. Crude Oil	57. Logos	72. Turis
11. Tembakau	27. Gaplek	42. Bahan Bakar Minyak	58. Kayu Gergaji	73. TKI
12. Kakao	28. Kedaraan	43. Gas/LNG	59. Kayu Lapis	74. Lain-lain
13. Teh	29. Furniture	44. Aspal	60. Rotan	
14. Karet	30. Garam	45. Timah	61. Hasil Hutan Lainnya	
15. Kopra	31. Bahan Kimia	46. Bauksit	62. Ikan	
16. Minyak Sawit		47. Tembaga	63. Udang	

II. DAFTAR JENIS KEMASAN

1. Bag. (pak/karung)
2. Case (Peti)
3. Bale (bal/bundal)
4. Barel (Kaleng)
5. Drum
6. Pallet
7. Petikemas
8. Barge

III. DAFTAR TYPE KAPAL

1. Konvensional
2. Container (Petikemas)
3. Semi Containner (Petikemas)
4. Landing Craft
5. Tongkang
6. Roro
7. Tunda
8. Penumpang
9. Bulk (curah)
10. Tanker
11. Lash
12. Ikan
13. Kapal Layar (1)
14. Kapal Layar Motor (1)
15. Kapal Motor (1)
16. Lain-lain

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 63

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan domisili perusahaan
2)	Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
3)	Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan
4)	Diisi dengan nama perusahaan
5)	Diisi dengan nama pimpinan perusahaan
6)	Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan

Contoh 64DATA UMUM PERUSAHAAN

Posisi : 31 Desember 20

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Nama perusahaan Angkutan Laut
Pelayaran Rakyat (SIUPER) |1) |
| 2. | Akte Pendirian Perusahaan Nomor
Notaris |2)
.....3) |
| | Nomor dan tanggal |4) |
| 3. | Nomor dan tanggal SIUPER |5) |
| 4. | Alamat perusahaan |6) |
| | Nomor telepon |7) |
| | Domisili |8) |
| 5. | Nama / DIRUT |9) |
| | Alamat Rumah |10) |
| | Nomor Telepon |11) |
| 6. | Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan |12) |
| 7. | Jumlah Tenaga Kerja |13) Orang |
| | a. Darat : | |
| | - Pusat |14) Orang |
| | - Cabang |15) Orang |
| | b. Laut |16) Orang |
| 8. | Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut
Pelayaran Rakyat |17) Buah |
| | Alamat kantor cabang terlampir | |
| 9. | Keanggotaan INSA (Nomor- Tanggal) |18) |
| 10. | Jumlah kapal yang dimiliki |19) Unit |
| | Jumlah Taruna /Siswa Praktek PRODA / PKL *) |20) Orang |
| | Jumlah kapal yang dioperasikan |21) Unit |
| | | 20 22) |

DIREKTUR UTAMA

(.....23)}

*) Bagi kapal yang berukuran diatas GT. 750

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 64

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nama perusahaan
2)	Diisi dengan nomo akte pendirian perusahaan
3)	Diisi dengan nama notaries pada akte pendirian perusahaan
4)	Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan
5)	Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER
6)	Diisi dengan alamat perusahaan
7)	Diisi dengan nomor telepon perusahaan
8)	Diisi dengan domisili perusahaan
9)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan
10)	Diisi dengan alamat rumah Dirut perusahaan
11)	Diisi dengan nomor telepon rumah
12)	Diisi dengan NPWP perusahaan
13)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja
14)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di pusat
15)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di cabang
16)	Diisi dengan jumlah tenaga kerja di laut
17)	Diisi dengan jumlah cabang
18)	Diisi dengan nomor dan tanggal keanggotaan INSA
19)	Diisi dengan jumlah kapal yang dimiliki
20)	Diisi dengan jumlah taruna/siswa praktek
21)	Diisi dengan jumlah kapal yang dioperasikan
22)	Diisi dengan tanggal surat
23)	Diisi dengan nama Dirut perusahaan

Contoh 64

.....1)
2)

Nomor : 3) 4),5)
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Surat Kepada
 Izin Operasi Perusahaan Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) Jl. Medan Merdeka Barat No.8
 di
JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS).
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah disahkan KEMENKUMHAM;
 - b. Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan) yang masih berlaku;
 - c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar dari Ditjen Pajak;
 - d. Foto Copy Ijazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma III di Bidang Pelayaran Niaga yang di-legalisir;
 - e. Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.
4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. 6)

Tembusan :
 - Menhub RI.

..... 7)
 8)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 65

NO	URAIAN
1)	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
2)	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.
3.	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.
4.	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.
5.	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.
6.	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
7.	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
8.	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.

Contoh 66

Nomor :1) Jakarta,2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Penundaan Izin Operasi Kepada
 Perusahaan Angkutan Laut Yth. Direktur Utama
 Khusus (SIOPSUS) PT.3)
4)
 di
 5)

1. Menunjuk surat Saudara No.6) tanggal7) perihal permohonan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut Perusahaan Rakyat (SIUPER).
2. Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No. tahun yaitu:
 - a. 8)
 - b.
3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan dimaksud segera dipenuhi.
4. Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

..... 9)
10)

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;
2. Kasubbag TU Ditlala.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 66

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin operasi.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin operasi.
3)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin operasi.
4)	Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin operasi.
5)	Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin operasi.
6)	Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin operasi.
7)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin operasi.
8)	Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin operasi.
9)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
10)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 67

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)
(Berdasarkan PP No.20 Tahun 2010 Jo. PP No.22 Tahun 2011 tentang Angkutan di Perairan)

NOMOR : 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor.2) tanggal3) diberikan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) kepada :

Nama Perusahaan :4)
Bidang Usaha Pokok :5)
Alamat Kantor Perusahaan :6)

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab :7)
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab :8)

Nomor Pokok Wajib Pajak :9)
Nilai Modal Perusahaan :10)
Status Perusahaan :11)

Kewajiban Pemegang SIOPSUS :

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.
2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, domisili perusahaan, NPWP perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.
4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIOPSUS ini.
5. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
6. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna / calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.
7. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIOPSUS ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda, memperoleh izin operasi secara tidak sah dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Operasi ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 12)

Penanggung Jawab

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

..... 15)

..... 16)

..... 13)

..... 14)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 67

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat izin operasi.
2)	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pemohon izin operasi.
3)	Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin operasi.
4)	Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin operasi.
5)	Diisi dengan usaha pokok perusahaan pemohon izin operasi.
6)	Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin operasi.
7)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi.
8)	Diisi dengan alamat penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi.
9)	Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin operasi.
10)	Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemohon izin operasi.
11)	Diisi dengan status perusahaan pemohon izin usaha (PMDN / PMA).
12)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin operasi.
13)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
14)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
15)	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi.
16)	Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi.

Contoh 68

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pembukaan
 Kantor Cabang di Pelabuhan1)

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 Jl. Medan Merdeka Barat No.8

di

JAKARTA

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT.2) terhitung mulai tanggal3) Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan4) Dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan :5)
 - b. No & Tgl :6)
 - c. N.P.W.P Perusahaan :7)
 - d. Nama Kepala Cabang :8)
 - e. Alamat kantor Cabang :9)
 - f. Status Kantor :10)
2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :
 - a. Copy SIUPAL / SIUPER
 - b. SK Pengangkatan Kepala Cabang
 - c. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakapel.
3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Lingkungan Maritim.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami ,
 PT.....
 Penanggung Jawab

(.....11)

Tembusan Yth :

1. Gubernur KDH Tkt I Propinsi setempat;
2. Bupati/Walikota
3. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;
4. Kepala kantor Administrator setempat;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
6. Kantor Pelabuhan Batam;
7. Arsip.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 68

NO	URAIAN
1.	Diisi nama pelabuhan cabang
2.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
3.	Diisi tanggal permohonan pembukaan kantor cabang
4.	Diisi nama pelabuhan cabang
5.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
6.	Diisi Nomor dan tanggal permohonan
7.	Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan
8.	Diisi nama kepala cabang
9.	Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili
10.	Diisi dengan status kantor (milik/sewa)
11.	Diisi nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 69

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pemberitahuan Pembukaan
 Kantor Cabang di Pelabuhan1)

Kepada Yth.
 Gubernur Provinsi

di

.....

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT.2) terhitung mulai tanggal3) Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan4) Dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan :5)
 - b. No & Tgl :6)
 - c. N.P.W.P Perusahaan :7)
 - d. Nama Kepala Cabang :8)
 - e. Alamat kantor Cabang :9)
 - f. Status Kantor :10)
2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :
 - a. Salinan SIUPER
 - b. SK Pengangkatan Kepala Cabang
 - d. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakapel.
3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Lingkungan Maritim.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih .
 Hormat kami ,
 PT.....
 Penanggung Jawab
 (.....11)

Tembusan Yth :

1. Dirjen Hubla;
2. Gubernur KDH Tkt I Propinsi setempat;
3. Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;
4. Kepala kantor Administrator setempat;
5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
6. Kantor Pelabuhan Batam;
7. Arsip.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 69

NO	URAIAN
1.	Diisi nama pelabuhan cabang
2.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
3.	Diisi tanggal permohonan pembukaan kantor cabang
4.	Diisi nama pelabuhan cabang
5.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
6.	Diisi Nomor dan tanggal permohonan
7.	Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan
8.	Diisi nama kepala cabang
9.	Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili
10.	Diisi dengan status kantor (milik/sewa)
11.	Diisi nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 70

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Pemberitahuan Pembukaan
 Kantor Cabang di Pelabuhan1)

Kepada Yth.
 Bupati/Walikota

di

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT.2) terhitung mulai tanggal3) Akan membuka kantor Cabang di Pelabuhan4) Dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan :5)
 - b. No & Tgl :6)
 - c. N.P.W.P Perusahaan :7)
 - d. Nama Kepala Cabang :8)
 - e. Alamat kantor Cabang :9)
 - f. Status Kantor :10)
2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :
 - a. Salinan SIUPER
 - b. SK Pengangkatan Kepala Cabang
 - e. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakapel.
3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (milik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta Perlindungan Lingkungan Maritim.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih .
 Hormat kami ,
 PT.....
 Penanggung Jawab
 (.....11)

Tembusan Yth :

1. Dirjen Hubla;
8. Gubernur KDH Tkt I Propinsi setempat;
9. Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;
10. Kepala kantor Administrator setempat;
11. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
12. Kantor Pelabuhan Batam;
13. Arsip.

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 70

NO	URAIAN
1.	Diisi nama pelabuhan cabang
2.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
3.	Diisi tanggal permohonan pembukaan kantor cabang
4.	Diisi nama pelabuhan cabang
5.	Diisi nama perusahaan kantor pusat
6.	Diisi Nomor dan tanggal permohonan
7.	Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan
8.	Diisi nama kepala cabang
9.	Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili
10.	Diisi dengan status kantor (milik/sewa)
11.	Diisi nama penanggung jawab perusahaan

Contoh 71

Nomor :1) Jakarta,.....2)
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pembukaan Kantor Cabang
 Perusahaan Angkutan Laut
 di Pelabuhan3)

Kepada
 Yth. Direksi
 PT.4)
5)
 di
6)

1. Menunjuk surat Saudara No.7) tanggal8), perihal tersebut pada pokok surat dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 dan KEPMENHUB No.KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT.9) selaku pemegang SIUPAL No.B.X-.....10) /AL.001 tanggal 11) di :
 - a. Pelabuhan : 12)
 - b. Alamat : 13)
 - c. Telepon / Fax :14) / 15)
 - d. Nama Penanggung Jawab / Kepala Cabang : 16)
 - e. Alamat Kepala Cabang : 17)
 - f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan Kepala Cabang : 18) tanggal 19)
2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut :
 - a. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim serta ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.
 - b. Kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang bersangkutan.
 - c. Kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional perusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan setempat.
 - d. Setiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang dan perubahan-perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
 - e. Perusahaan induk secara financial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang dilakukan oleh kantor cabang.
 - f. Kantor cabang ditutup dengan sendirinya bilamana perusahaan induk yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan lagi dan atau tidak ada kunjungan kapal milik / charter selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Tembusan :

1. DIRJEN HUBLA; 23)
2. SESDITJEN HUBLA; 24)
3. Kadis Perhubungan Provinsi 20);
4. Kepala Kantor Administrator Pelabuhan21);
5. DPP INSA;
6. DPC INSA.22).

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 71

Nomor	Uraian Isian
1)	Diisi dengan nomor pemberitahuan pembukaan kantor cabang.
2)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya pemberitahuan pembukaan kantor cabang.
3)	Diisi dengan nama pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang.
4)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6)	Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
7)	Diisi dengan nomor permohonan pembukaan kantor cabang.
8)	Diisi dengan tanggal permohonan pembukaan kantor cabang.
9)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional
10)	Diisi dengan nomor Surat Izin Usaha
11)	Diisi dengan tanggal Surat Izin Usaha
12)	Diisi dengan nama pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang.
13)	Diisi dengan alamat kantor cabang.
14)	Diisi dengan nomor telepon kantor cabang.
15)	Diisi dengan nomor faksimile kantor cabang.
16)	Diisi dengan nama kepala kantor cabang.
17)	Diisi dengan alamat kepala kantor cabang.
18)	Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang.
19)	Diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang.
20)	Diisi dengan nama provinsi tempat dibukanya kantor cabang.
21)	Diisi dengan nama kantor otoritas pelabuhan / kantor administrator pelabuhan / kantor pelabuhan / kantor unit penyelenggara pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang.
22)	Diisi dengan nama provinsi tempat dibukanya kantor cabang.
23)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
24)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Contoh 72

.....1)
2)

Nomor : 3) 4),5)
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Spesifikasi Kapal Kepada

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 Jl. Medan Merdeka Barat No.8

di

JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan Spesifikasi Kapal.
2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. Surat permohonan
 - b. Salinan Grosse Akte;
 - c. Salinan Surat Ukur yang masih berlaku;
 - d. Sertifikat Keselamatan Konstruksi yang masih berlaku;
 - e. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan yang masih berlaku;
 - f. Ship particular yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
 - g. Sertifikat Klas.
3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.
4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

PT. 6)

Tembusan :
 - Dirjen Hubla.

..... 7)
 8)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 72

NO	URAIAN
1	Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
2	Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili perusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.
3.	Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.
4.	Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.
5.	Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.
6.	Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
7.	Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
8.	Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.

Lampiran : Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
(SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER)

Nomor : B.X - 1) /AL.001

Tanggal :2)

Nomor Spesifikasi Kapal :3)

SPESIFIKASI KAPAL YANG DIMILIKI/DIOPERASIKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN
LAUT (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER)
PT.4)

1. Nama Kapal :5)
2. Nomor Pendaftaran :6)
3. Grosse Akte Nomor :7) Tanggal8)
4. Dikeluarkan oleh :9)
5. Tanda Selar :10)
6. Pemilik Kapal :11)
7. Nama Panggilan (Call Sign) :12)
7. Nama Galangan Pembuat Kapal/Tahun Pembangunan :13) /14)
8. Bendera :15) Konstruksi :16)
9. Dikelaskan pada :17) Code Klas :18)
Daerah pelayaran :19)
10. Type :20)
11. Ukuran Pokok :
 - a. Panjang kapal seluruh (LOA) :21)
 - b. Panjang antara garis tegak (LBP) :22)
 - c. Lebar Kapal :23)
 - d. Dalam (h) :24)
 - e. Draft Kapal :
 - 1) Saraf musim panas (Summer Draft) :25)
 - 2) Saraf musim dingin (Winter Draft) :26)
 - 3) Draft pada air tawar :27)
 - 4) Saraf Tropik (Tropical Draft) :28)
 - f. Isi Kotor (GT) :29)
 - g. Bobot Mati (DWT) :30)
 - h. Kapasitas Angkut :
 - 1) Penumpang :31)
 - 2) Mobil :32)
 - 3) Container :33)
 - 4) Grain Space :34)
 - 5) Bale Space :35)
12. Jumlah Awak Kapal (Crew) :36)
13. Jumlah Palka :37)
14. Crane kapal (Derrick) :
 - a. Jumlah :38)
 - b. Kapasitas Angkat :39)
15. Mesin induk :

a. Merk :40)	Mesin Bantu :
b. Tahun :41)	a. Merk :43)
c. Nomor :42)	b. Tahun :44)
	c. Nomor :45)
16. Kecepatan / Speed:
 - a. Maksimum :46)
 - b. Normal :47)
 - c. Ekonomis :48)
17. Bahan Bakar :
 - a. Jenis Bahan Bakar yang digunakan :49)
 - b. Kebutuhan Bahan Bakar per hari (dalam perjalanan) :50)

Jakarta, 51)

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAU

.....52)
..... 53)

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 73

NOMOR	URAIAN ISIAN
1)	Diisi dengan nomor Surat Izin Usaha (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER).
2)	Diisi dengan tanggal Surat Izin Usaha (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER).
3)	Diisi dengan nomor spesifikasi kapal.
4)	Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
5)	Diisi dengan nama kapal.
6)	Diisi dengan nomor pendaftaran kapal.
7)	Diisi dengan nomor grosse akte kapal.
8)	Diisi dengan tanggal grosse akte kapal.
9)	Diisi dengan tempat pendaftaran kapal.
10)	Diisi dengan tanda selar kapal.
11)	Diisi dengan nama pemilik kapal (WNI atau BHI atau Badan Usaha Patungan).
12)	Diisi dengan nama panggilan kapal.
13)	Diisi dengan tempat pembuatan kapal.
14)	Diisi dengan tahun pembuatan kapal.
15)	Diisi dengan bendera kebangsaan kapal.
16)	Diisi dengan konstruksi (baja / kayu / <i>fibreglass</i>).
17)	Diisi dengan badan klasifikasi tempat kapal diklaskan.
18)	Diisi dengan kode lambung yang diberikan oleh badan klasifikasi.
19)	Diisi dengan daerah pelayaran kapal yang diizinkan oleh instansi yang berwenang.
20)	Diisi dengan tipe kapal.
21)	Diisi dengan ukuran panjang keseluruhan kapal.
22)	Diisi dengan ukuran panjang antara garis tegak kapal.
23)	Diisi dengan ukuran lebar kapal.
24)	Diisi dengan ukuran dari dasar kapal sampai dek utama kapal.
25)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim panas.
26)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim dingin.
27)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada air tawar.
28)	Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim tropis.
29)	Diisi dengan isi kotor kapal.
30)	Diisi dengan bobot mati kapal.
31)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan penumpang dalam satuan orang.
32)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan mobil dalam satuan unit.
33)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan container dalam satuan teus.
34)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan curah dalam satuan cft.
35)	Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan umum (general cargo) dalam satuan cft.
36)	Diisi dengan jumlah anak buah kapal (crew).
37)	Diisi dengan jumlah ruang palka dalam satuan unit.
38)	Diisi dengan jumlah crane yang tersedia dalam satuan unit.
39)	Diisi dengan kapasitas angkat crane dalam satuan ton.
40)	Diisi dengan merk, jumlah dan horse power mesin induk kapal.
41)	Diisi dengan tahun pembuatan mesin induk kapal.
42)	Diisi dengan nomor seri mesin induk kapal.
43)	Diisi dengan merk, jumlah dan horse power mesin bantu kapal.
44)	Diisi dengan tahun pembuatan mesin bantu kapal.
45)	Diisi dengan nomor seri mesin bantu kapal.
46)	Diisi dengan kecepatan maksimum kapal dalam satuan knot.
47)	Diisi dengan kecepatan normal kapal dalam satuan knot.
48)	Diisi dengan kecepatan ekonomis kapal dalam satuan knot.
49)	Diisi dengan jenis bahan bakar yang digunakan oleh kapal (HSD / MFO / MDO).
50)	Diisi dengan kebutuhan bahan bakar per hari dalam satuan ton per hari.

51)	Diisi dengan tanggal ditandatanganinya spesifikasi kapal.
52)	Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
53)	Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

MENTERI PERHUBUNGAN,

E.E. MANGINDAAN